

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI JEJAJING DESA WISATA (JADESTA)
DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA PALANGKA
KABUPATEN SINJAI**



Oleh:

IAN REZKI PRATAMA

Nomor Induk Mahasiswa: 105641108120

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI JEJAJING DESA WISATA (JADESTA)
DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA PALANGKA
KABUPATEN SINJAI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh :

IAN REZKI PRATAMA
Nomor Stambuk Mahasiswa : 105641108120

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Jejaring Desa Wisata (JADESTA)
Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Palangka
Kabupaten Sinjai

Nama Mahasiswa : Ian Rezki Pratama

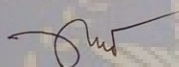
Nomor Induk Mahasiswa : 105641108120

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

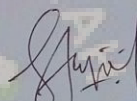
Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Amir Muhiddin, M.Si



Hamrun, S.Ip, M.Si

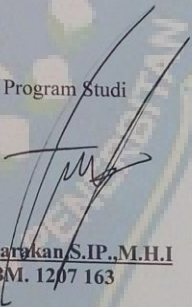
Mengetahui

Dekan Fisip Unismuh Makassar

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727



Ahmad Harokan S.IP., M.H.I
NBM. 1207 163

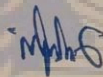
HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor 0252/FSP/A.4-II/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dengan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari selasa, Tanggal 20 Mei 2024.

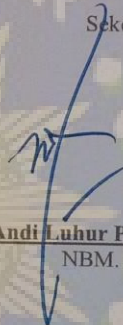
Mengetahui

Ketua

Sekretaris



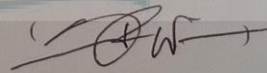
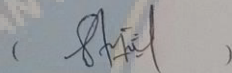
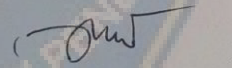
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727



Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM. 992797

Tim Penguji

1. Dr. Amir Muhiddin, M.Si
2. Hamrun, S.IP., M.Si
3. Muh. Randhy Akbar., S.IP. M.Si



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di Bawah Ini:

Nama Mahasiswa : Ian Rezki Pratama

Nomor Induk Mahasiswa : 105641108120

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Mei 2024

Yang Menyatakan,

Ian Rezki Pratama

ABSTRAK

Ian Rezki Pratama. Tahun 2024 Dr. Amir Muhiddin, Bapak Hamrun, Implementasi JADESTA Dalam Pengembangan Tata Kelola Pariwisata (Studi Kasus Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Selatan Desa Palangka)

Penelitian ini bertujuan untuk memahami *Implementasi E-Government* dalam pengembangan pariwisata Berbasis *Website* JADESTA / Jejaring Desa Wisata di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Dan untuk jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif sumber data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-government* dalam pengembangan tata kelola pariwisata yang ada di desa palangka, kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai, menggambarkan Desa Palangka menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan program JADESTA. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan tata kelola pariwisata yaitu karena sumber daya manusia yang belum mempunyai dikarenakan adanya perombakan aparatur desa yang dilakukan setelah pergantian kepala desa, tantangan berikutnya yang dimana pariwisata yang sudah tidak dapat lagi dikembangkan dikarenakan terkendala masalah dana. Dengan menggunakan teori menurut Ripley dan Franklin, hasil menunjukkan bahwa komponen *implementasi* yaitu Tingkat keputusan aparatur, kelancaran dan tidak adanya persoalan, serta kinerja dalam implementasi program JADESTA dalam pengembangan tata kelola pariwisata desa palangka, kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai tidak sesuai, dan perlu adanya bantuan berupa dana dan partisipasi secara penuh dari pihak pemerintah pusat terhadap pemerintah desa untuk mengembangkan kembali potensi pariwisata.

Kata Kunci: Implementasi, *E-Government*, JADESTA (Jejaring Desa Wisata)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi *E-Government* Dalam Pengembangan Tata Kelola Pariwisata (Studi Kasus Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Selatan Desa Palangka)”, Sebagai salah satu syarat mendapat Gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Salam dan sholawat semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah SWT kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan kepada kita semua. Penulis berharap apa yang dipaparkan dalam skripsi ini dapat memberikan informasi baru bagi kita semua. Orang tua saya tercinta ayahanda Mustafa dan ibunda Rania yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga dan terimakasih sudah menjadi orang tua yang sangat luar biasa baik, terimakasih sudah menemani penulis berjuang sejauh ini. Penulis menyadari ucapan terimakasih ini sangat tidak sebanding dengan pengorbanan kedua orang tua penulis dalam membimbing dan menemani penulis berjuang sejauh ini. penulis juga sangat meminta maaf kepada kedua orang tua penulis apa bila selama ini penulis masih sering melakukan kesalahan. Terimakasih atas setiap iringan doa di setiap sujudnya hingga penulis sampai pada saat seperti ini. Penulis sangat berharap suatu saat nanti penulis dapat membalas segala pengorbanan yang telah di lakukan oleh orang tua penulis bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan masukan sangat Penulis hargai.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memimpin Universitas ini dengan baik.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina Fakultas ini dengan baik.
3. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang juga telah memabantu peneliti dan telah membina jurusan ini dengan sangat baik.
4. Bapak Dr. Amir Muhiddin, M.Si selaku Pembimbing 1 dan Bapak Hamrun, S.Ip.,M.Si yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tidak ternilai harganya.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga
6. Kepada Bapak Muhammad Ramli. S.Pi selaku Sekretaris kepala desa Palangka dan bapak Sekretaris BPD Ridwandi beserta staf-stafnya, yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Terimakasih juga kepada masyarakat Rante Mario yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

8. Kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang ramah dan cekatan dalam melayani setiap keluhan penulis dalam menyelesaikan skripsi, khususnya untuk bapak, ibu yang selalu memudahkan dalam pengurusan berkas persyaratan ujian skripsi dan selalu memberikan dorongan untuk semangat.
9. Kepada keluarga besar saya yang juga telah banyak membantu baik dalam material, moril, dan dukungannya selama ini, terimakasih telah mendukung saya sejauh ini dan selalu memberikan semangat kepada penulis Ketika penulis sedang merasa tidak baik-baik saja.
10. Dan penulis juga sangat berterimakasih kepada sahabat-sahabat penulis khususnya Azizah, Fina, Restu, Ana, Hilma, Fatur, Iwan, Iyan, Faiz, Inna, Ewink Terima kasih atas dukungan moril dan materilnya serta dukungan dan motifasinya terimakasih telah menemani penulis berjuang dari semester satu hingga sekarang, terimakasih juga karena sejauh ini sudah menjadi saudara taksedarah di tanah Rantau ini, Semoga kebersamaan kita sampai tua dan membawa kenangan indah.
11. Terimakasih kepada keluarga besar IPC atas kebersamaanya selama ini, canda tawa yang di berikan dalam kelas yang sangat berkesan bagi penulis.
12. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai Upaya yang telah di sumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal disisi Allah SWT dan tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akhirnya penulis memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala khilaf baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja.

Sinjai, 27 Mei 2024

IAN REZKI PRATAMA



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL	ii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Teori dan Konsep	13
D. Fokus Penelitian	22
E. Deskripsi Fokus Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	24
B. Jenis dan Tipe Penelitian	24
C. Sumber Data	25
D. Informan	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data.....	28

G. Teknik Pengabsahan Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN	30
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	30
B. Hasil Penelitian	36
C. Pembahasan Hasil Penelitian	60
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era modernisasi seperti yang kita alami sekarang ini, perkembangan teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan bahkan telah membuat kehidupan manusia sudah nyaris tidak bisa lepas dari teknologi, hampir di semua sektor dan aspek kehidupan manusia menggunakannya, baik dalam hal pengetahuan, ekonomi, budaya akan dimanjakan dengan teknologi, dari yang biasanya mengerjakan sesuatu menggunakan alat tradisional sekarang sudah menggunakannya dengan berbagai macam teknologi seperti teknologi komputer dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk penerapan teknologi yang kian mendapatkan perhatian adalah konsep *e-government* atau pemerintahan elektronik. Penerapan *e-government* membawa potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kualitas layanan publik. Era ini tidak hanya berdampak pada perkembangan wilayah perkotaan, tetapi juga telah menembus batas-batas geografis dan memasuki wilayah pedesaan. Teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita berinteraksi, bekerja, dan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek penting dari perkembangan ini adalah penerapan konsep *e-government* atau pemerintahan elektronik.

Pemerintah dalam upaya pemberian pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat tersebut dikenal dengan istilah *e-government*. Penegasannya tidak ada batas wilayah antara satu dengan yang lain. Seiring dengan perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai sektor tengah mengalami perubahan. Begitu juga pada sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model pengelolaan pariwisata yang dilakukan melalui aplikasi dan *website*. Pelayanan pemerintah yang birokratis dan sangat manual dieliminir melalui pemanfaatan aplikasi menjadi lebih *fleksibel* dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna.

Seiring berjalannya waktu, telah banyak daerah yang menerapkan *e-government* pada pelayanan publik, ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga pemerintahan yang mulai memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi ini guna diaplikasikan sebagai media dalam memberikan kemudahan penyampaian informasi publik dan kemudahan pelayanan publik. Hal ini tentunya penerapan *e-government* bukan semata-mata karena perkembangan itu dari perspektif lingkungan strategis, tetapi lebih penting lagi adalah dirasakan adanya kebutuhan akan penerapan Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi tersebut guna mencapai kualitas pelayanan prima kepada masyarakat. Disamping itu juga guna tercapainya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, koherensi dan daya guna lain yang dimungkinkannya, (Sosiawan dalam Yulhendri, 2020:12).

Transparansi dalam pemerintahan juga merupakan elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya platform *e-government*, informasi tentang anggaran publik, kebijakan pemerintah, dan proyek-proyek Pembangunan dapat di akses oleh Masyarakat dengan mudah. Ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana publik dan memberikan masukan

yang konstruktif. Selain itu, *e-government* juga mendorong partisipasi aktif Masyarakat dapat memberikan pendapat mereka tentang kebijakan dan program-program yang sedang dikerjakan. Partisipasi ini memberikan legitimasi pada kebijakan yang diambil dan membantu memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dengan baik. Dengan perkembangan *e-government*, sekarang ada kemungkinan untuk menggunakannya untuk memajukan pemerintahan yang baik atau pelayanan pemerintah (Rafinzar and Kismartini 2020).

Desa merupakan garda terdepan pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pembangunan nasional. Penguatan pedesaan adalah hal yang harus diprioritaskan dalam kasus ini. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengubah daerah sekitar pedesaan menjadi pusat pengembangan manusia, ekonomi, sosial, dan infrastruktur (Maulita 2022).

Penerapan *e-government* memiliki potensi besar untuk membentuk desa yang lebih maju secara teknologi dan memiliki kualitas layanan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Selain itu *e-government* juga membuka peluang untuk penyediaan layanan publik yang lebih baik. Informasi mengenai pariwisata yang ada dapat diakses secara lebih mudah oleh masyarakat. Hal ini memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat yang ada di desa. Dan Pengembangan *e-government* juga dapat menjadi alternatif strategis untuk berbagi informasi di dua arah antara pemerintah dan masyarakat. (Rafinzar and Kismartini 2020).

Sebagai hasil dari *COVID-19* pandemi, yang mencegah populasi dari menerima layanan dari pemerintah dengan tepat waktu, ekonomi Indonesia juga pernah menderita. Oleh karena itu, pemerintah desa telah ditugaskan untuk

memaksimalkan kapasitas digitalisasi dan menggunakannya untuk menyediakan layanan digital kepada masyarakat umum (Prayogi et al., 2020). Sebaliknya, digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital untuk informasi dan komunikasi melalui perangkat digital seperti *smartphone*, komputer, dan perangkat lainnya seperti pendukung. (Lindgren et al., 2019). Akibatnya, proses manual sebelumnya sekarang otomatis.

Pandemi memang telah memberikan dampak bagi pariwisata dan ekonomi kreatif, namun juga sekaligus menciptakan *trend* / kecenderungan baru. Salah satu *trend* yang muncul yaitu meningkatnya minat wisatawan untuk berwisata di alam terbuka. Desa wisata dapat menjadi pilihan bagi wisatawan untuk dapat menikmati alam terbuka, sembari merasakan pengalaman berwisata di tengah kehidupan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, Kemenparekraf / Badan Parekraf terus berkomitmen mendukung pengembangan desa wisata, yang juga menjadi salah satu agenda dalam pembangunan nasional RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020-2024. Tujuan dalam pengembangan desa wisata yaitu menumbuhkan desa-desa wisata berkembang menjadi maju hingga mandiri, sehingga tercipta lapangan pekerjaan dan menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Berbagai potensi desa wisata yang ada di Indonesia memang sudah sepatutnya digarap bersama-sama, namun harus tetap menjaga kearifan lokal dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan dari program yang telah dibuat oleh Pihak KEMENPAREKRAF (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) / BADAN

PAREKRAF (Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan pengembangan desa wisata sangat memerlukan kolaborasi antar Kementerian / Lembaga terkait, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, asosiasi, serta media. Dan dari dampak dari adanya pandemi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Sinjai selaku Bupati Kabupaten Sinjai ingin mengembalikan kembali potensi pariwisata yang ada di Desa untuk meningkatkan kembali pendapatan desa dengan mewajibkan setiap desa untuk mengembangkan potensi pariwisatanya melalui media elektronik yang dikenal dengan istilah JADESTA (Jejaring Desa Pariwisata).

Program JADESTA yang menjadi tanggungjawab DISKOMINFOSANDI (Dinas Komunikasi dan Informasi dan Persandian) di kabupaten sinjai ini telah berjalan di bawah kepemimpinan Bupati Andi Seto Ghadista Asapa, SH., LL.M. Dan sejak awal peluncuran program ini, dari 67 desa dan 13 kelurahan yang ada di kabupaten sinjai yang dimana dikutip dari hak cipta berupa *website* yang dibuat oleh KEMENPAREKRAF RI, pada tahun 2021 memperlihatkan bahwa Pemerintah, DISKOMINFO dan Persandian Kabupaten Sinjai telah membentuk 20 desa/kelurahan yang telah memasukan data ke *website* JADESTA. (Sumber : <https://sulsel.jadesta.com>)

Dengan adanya *website* tersebut, menjadi jalan untuk melaksanakan program JADESTA. Dimana *website* dimanfaatkan untuk penyebarluasan informasi tentang pariwisata desa, hingga pelayanan digital kepada Masyarakat. Salah satu desa yang menjadi pelaksana program JADESTA yakni Desa Palangka. Desa Palangka

menjadi bagian dari program Pemerintah Sinjai terkait dengan kemajuan daerah yang dimulai dari desa.

Sebelum adanya pengimplementasian program JADESTA di desa palangka, potensi pariwisata yang ada di desa ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Kantor desa palangka merupakan instansi yang mempunyai tanggung jawab besar untuk merealisasi atau mengimplementasikan program JADESTA yang di laksanakan didesa. Yang Dimana Pihak kantor Desa telah memasukan data pariwisata ke dalam *website* untuk mempromosikan objek wisatanya ke masyarakat. (Sumber: Desa Palangka, data diolah)

Dalam pengembangannya, masyarakat bukanlah objek, melainkan pelaku utama. Sehingga, pendekatan dalam pengembangan desa wisata adalah pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Desa wisata dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat atas hasil partisipasi penuh dari masyarakat. Selain kolaborasi, terdapat dua kunci penting lain yang dapat berperan dalam keberhasilan pengembangan desa wisata yaitu inovasi dan adaptasi. Strategi inovasi dilakukan dengan pendekatan *big data* untuk memetakan potensi dan menguatkan berbagai aspek pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

B. Rumusan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan beberapa rumusan masalah yang sangat penting bagi kegiatan penelitian karena dengan adanya perumusan masalah maka pokok bahasan lebih terfokus pada beberapa poin. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

Bagaimana implementasi JADESTA (Jejaring Desa Wisata) dalam pengembangan pariwisata di Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami potensi serta kendala dalam pengimplementasian jejaring desa dalam pengembangan pariwisata di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Secara khusus, tujuan penelitian ini terbentuk berdasarkan rumusan masalah di atas dan tujuan penelitian yang dapat disampaikan antara lain:

1. Untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Desa Palangka dalam penerapan program JADESTA
2. Mengetahui Tantangan dan Hambatan Pemerintah Desa Palangka dalam Penerapan Program JADESTA.
3. Mengidentifikasi kondisi saat ini terkait penerapan *e-government* dan pengembangan JADESTA di Desa Palangka.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

Hasil penelitian dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan dan program untuk mendorong pengembangan pariwisata melalui penerapan *e-government*

2. Bagi Masyarakat Desa Palangka

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang potensi dan manfaat penerapan *e-government* dalam kehidupan sehari-hari, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan tata kelola pariwisata.

3. Bagi peneliti lain

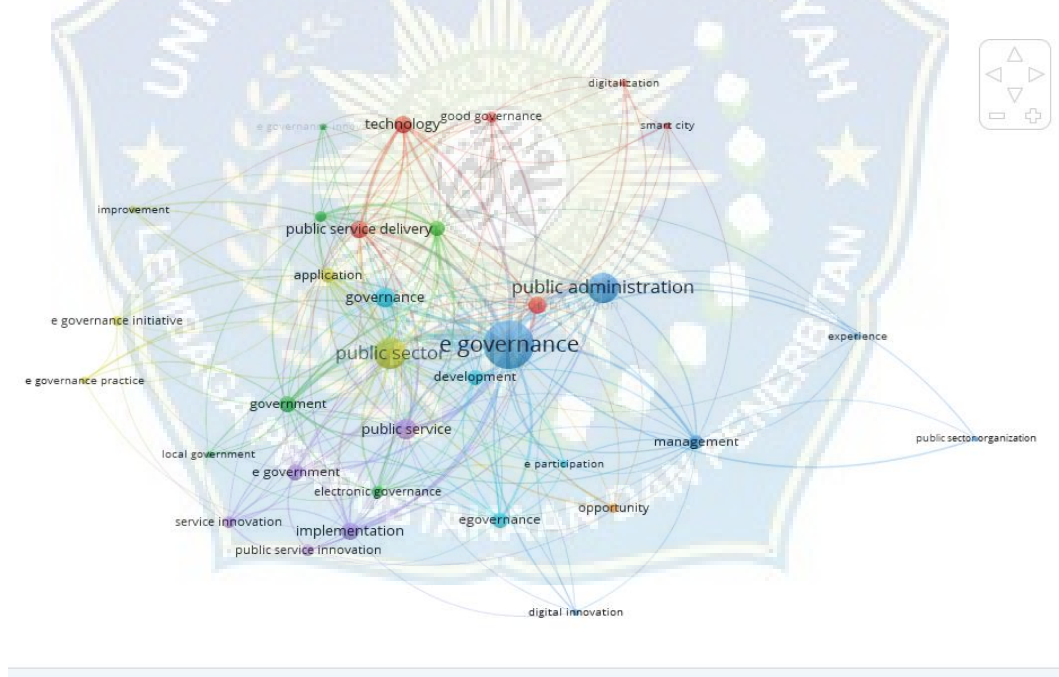
Penelitian ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi peneliti lain yang tertarik untuk menggali lebih dalam tentang pengimplementasian jejaring desa wisata (JADESTA) dalam pengembangan pariwisata.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung serta menjadi tolak ukur dalam sebuah penelitian baru. Dan dalam sebuah penelitian berjudul “Implementasi Jejaring Desa Wisata (JADESTA) dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Palangka Kabupaten Sinjai ” yang menggunakan olah data *vosviewer* untuk mengetahui penelitian terdahulu sebagai referensi yang digunakan untuk melengkapi serta membandingkan informasi dan data yang ditemukan, sebagai berikut :

Gambar .1 *network visualization*



Sumber diolah dari vosviwer 023

Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil dari penelusuran kepustakaan dengan menggunakan *publish or perish* ditemukan artikel jurnal dengan rentan waktu 2019-2023 yang dimana artikel-artikel tersebut berkaitan erat dengan kata kunci implementasi program JADESTA dalam pengembangan tata kelola pariwisata. Artikel-artikel ini kemudian di kelola menggunakan *vosviewer* untuk menentukan posisi proyek penelitian dari peneliti.

Hasil olah data *vosviewer* ada 110 items dan beberapa penelitian yang menjadi objek dalam penelitian terdahulu, diantaranya ada beberapa penelitian yang membahas tentang program JADESTA. Ada beberapa penelitian yang akan dijadikan sebagai acuan, di antaranya seperti yang di kutip dari jurnal yang telah dibuat oleh (Quayson, Bai, and Osei 2020) yang menyatakan bahwa JADESTA adalah program teladan yang berupaya menyediakan layanan energi terbarukan berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan. Dan dalam pengembangan wilayah pedesaan yang di laksanakan berdasarkan konsep JADESTA merupakan suatu program yang berbicara tentang penerapan teknologi telekomunikasi dalam pengelolaan pedesaan (Savina et al. 2020).

Selanjutnya penelitian yang membahas *Elektronik government* adalah pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada Masyarakat (Adrika & Frinaldi, 2023). *E-government* diterapkan pemerintah agar pelayanan publik lebih mudah, efektif, dan efisien (Yutristiani 2022). Dari penerapan/pelaksanaan *E-Government* dapat meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Aprilia, Kusbandrijo, and Rochim 2022).

Selain itu, terdapat pula sebuah hasil penelitian yang membahas tentang implementasi seperti penjelasan dari (EFENDI 2020) yang menyatakan bahwa Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok pemerintahan ataupun swasta yang diarahkan pada suatu program untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *e-goverment* sistem pelayanan hak tanggungan secara elektronik dan menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan dalam menjalankan sebuah program (Kalsum and Listyarini 2022).

Selanjutnya dalam melakukan analisis tata Kelola logistic peneliti menggunakan aplikasi *voswiwer* yang akan menampilkan pemetaan yakni dalam bentuk lima *visualisasi e-governance*, yaitu *public administration, delivery, public sector, service, dan implementation* dari gambar di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

<p>Klaster 1 (9 item)</p>	<p>(Biru) <i>public administration, e-governance, governance, management, experience, public sector organization, deveploment, e-participation, digital innovation.</i></p>
<p>Klaster 2 (4 item)</p>	<p>(Hijau) <i>delivery, government, public, local governance.</i></p>
<p>Klaster 3 (6 item)</p>	<p>(Kuning) <i>public sector, application, improvement, e governance initiative, e-governance practice, opportunity.</i></p>
<p>Klaster 4 (4 item)</p>	<p>(Merah) <i>service, technology, good governance, digitalization.</i></p>
<p>Klaster 5 (6 item)</p>	<p>(Ungu) <i>implementation, public service, service innovation, public service innovation, e government, e- governance.</i></p>

Sumber : Diolah oleh vosviewer tahun 2024

B. Teori dan Konsep

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan (KBBI,2019). Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan (Rofifah, 2020).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Guntur Setiawan yang mengatakan bahwa : “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan, untuk mewujudkannya membutuhkan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif” (Anggraeni, 2019).

Sedangkan menurut Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor sebagai berikut:

1) Tingkat keputusan aparatur,

Pelaksana atau implementor kebijakan publik dituntut memiliki sikap dan mentality yang mewujud pada tindakan yang patuh dan taat dalam melaksanakan setiap kebijakan;

2) Kelancaran dan tidak adanya persoalan

Para implementor kebijakan publik sedapat mungkin meminimalisir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor selalu menjadi problem solver bukan malah menjadi pemicu permasalahan;

3) Kinerja

Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektifnya proses implementasi kebijakan publik tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektifitas dan optimalisasi kinerja kebijakan juga ditentukan oleh kinerja individu para implementor kebijakan publik itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang telah di rencanakan atau di rancang dengan seksama dalam sebuah organisasi baik dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang berlangsung secara terus-menerus dan bukan hanya suatu aktivitas yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri namun tetap dipengaruhi objek berikutnya yaitu pada program kurikulum yang ada dalam sebuah lembaga.

2. E-Government

Penggunaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam sistem pemerintahan dikenal dengan *Electronic Government*. *Electronic government* diawali dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003

mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*. Melalui penerapan *e-government*, “Pemerintah memanfaatkan teknologi informasi guna menata sistem manajemen serta mengoptimalkan proses kerja di lingkungan pemerintah”. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 ini juga dijelaskan bahwa “penggunaan teknologi informasi dalam penerapan *e-government* yang dimaksud meliputi dua kegiatan yang sifatnya saling mempengaruhi”. Pertama, aktivitas yang meliputi pengelolaan informasi, pengolahan data, proses kerja, serta sistem manajemen yang berjalan secara elektronik. Kegiatan kedua merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pemberian pelayanan publik yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Sehingga masyarakat di seluruh wilayah dapat mengakses layanan publik dengan lebih cepat, murah dan mudah (Yuni and Adnan 2022).

Istilah *E-Government* merujuk pada penggunaan teknologi informasi pada organisasi pemerintahan agar organisasi tersebut lebih efektif dan transparan. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KEMENKOMINFO RI) terdapat definisi mengenai *e-government* yakni sebagai aplikasi teknologi informasi memanfaatkan layanan internet dan perangkat digital lainnya untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, badan usaha, pegawai, dan lembaga terkait lainnya berbasis online (Auliyaa, Hidayat, & Nababan 2022).

Dengan menerapkan model relasi *e-government* maka dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik melalui layanan yang tepat waktu, cepat, dan pelayanan yang merata kepada seluruh pengguna layanan

tanpa adanya diskriminasi. Hal ini dikarenakan, *e-government* menggunakan aplikasi berbasis internet yang dapat melakukan pengumpulan, transmisi, penyediaan data, dan komunikasi dengan pengguna secara cepat. Dengan adanya pelayanan publik yang efektif dan efisien maka akan mengurangi biaya operasional pemerintah. Dalam menerapkan *e-government* maka masyarakat dapat mengakses segala informasi tentang pemerintah yang di publikasikan melalui *website* seperti publikasi rapat, anggaran dan pengeluaran, dan lainnya.

Dengan demikian, *e-government* turut meningkatkan transparansi dalam pemerintahan sehingga dapat memberantas korupsi serta masyarakat dapat turut melakukan kontrol atas kegiatan pemerintah. Secara kebijakan, pemerintah mengatur *e-government* di Indonesia dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE” (Imania and Haryani 2021). Pada akhir tahun 2025 diharapkan pemerintah sudah berhasil mencapai keterpaduan SPBE baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan keterhubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi (Awaludin 2019).

Menurut Kusuma (2021), ada masalah yang dapat mengakibatkan pelaksanaan *e-government* terganggu, yaitu kemampuan peretas untuk melakukan kejahatan siber. Jika semua orang memiliki akses ke informasi pribadi seseorang melalui internet, tingkat keamanan *e-gvornment* tidak aman. *e-government* sendiri terdiri dari mengumpulkan dan mendistribusikan sejumlah besar informasi tentang warga negara, termasuk nama, alamat, nomor telepon, jadwal kerja, dan catatan properti. *Hacker* yang disebutkan di atas mampu menggunakan data dan informasi orang lain untuk keuntungan pribadi mereka sendiri atau untuk keuntungan orang lain yang mendukung mereka. Tasyah et al (2021) memberikan definisi *e-government* sebagai mekanisme baru dalam konteks interaksi saat ini antara pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang berada dalam situasi ketegangan.

Selain itu, tingkat keamanan data yang tinggi akan mengakibatkan ketidakpercayaan sistem pengiriman layanan publik oleh masyarakat umum. Akibatnya, untuk membuat akun sambil mengakses data pribadi, nama masing-masing pengguna, kata sandi, dan data lainnya harus disediakan. Selain itu, kerahasiaan data digunakan untuk melindungi terhadap penyebaran virus pada komputer. Oleh karena itu, memastikan keamanan dan integritas data harus menjadi prioritas utama dalam implementasi *e-government* berkualitas tinggi (Tasyah et al. 2021).

Dua faktor berikutnya yang harus dipertimbangkan adalah faktor sosial dan teknologi Perpecahan digital dimana sejumlah besar orang tidak memiliki akses *internet*, mencegah mereka dari mendapatkan manfaat dari sistem *e-*

government. Karena banyaknya daerah pedesaan di Indonesia yang terpencil dan kurang berkembang, sulit untuk mengumpulkan dana untuk pengembangan teknologi informasi modern dan sistem informasi yang mengarah pada keberadaan kesenjangan digital. Akibatnya, tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses ke infrastruktur telekomunikasi, apakah itu telepon atau listrik. Karena akses internet sangat penting untuk berbagi informasi dan memfasilitasi komunikasi dengan cepat dan mudah, ini mengakibatkan jumlah informasi yang terbatas tersedia untuk umum di dekatnya (Tasyah et al. 2021). Perkembangan teknologi telah mempengaruhi berbagai perspektif mulai dari masyarakat umum hingga pemerintah (Herdiana, 2019).

Maka dari itu, untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan digital maka Pemerintah diharapkan menyediakan infrastruktur telekomunikasi secara merata agar semua daerah yang ada di Indonesia dapat menjalankan model relasi *e-government* secara efektif dan efisien. Karena dengan adanya *E-Government* diharapkan pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih baik. Kewajiban menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas bukan semata-mata hanya tugas dari pemerintah daerah. Namun lebih jauh lagi, saat ini Pemerintah Desa sebagai unit terkecil dalam penyelenggara pemerintahan memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas. Terlebih semenjak ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa sehingga “pemerintahan desa diberikan otonomi penuh terhadap penyelenggaraan berbagai pembangunan di desa, termasuk menyediakan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi” (Putri et al, 2021).

3. Program JADESTA (Jejaring Desa Pariwisata)

Perencanaan dalam sebuah wisata sangatlah penting, dikarenakan perencanaan digunakan sebagai pedoman penyelenggara wisata, sebagai sarana untuk memprediksikan kemungkinan timbulnya hal-hal di luar dugaan sekaligus alternatif untuk memecahkannya, sebagai sarana untuk mengarahkan penyelenggaraan wisata sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan wisata secara efektif dan efisien, dan sebagai alat ukur tingkat keberhasilan wisata sebagai upaya pengawasan atau evaluasi dalam rangka memberikan umpan balik bagi penyelenggaraan wisata selanjutnya (Imaddudin 2020).

Penggunaan sistem elektronik melalui program jadesta menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 (desa wisata) menyampaikan bahwa Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. (Anon 2019)

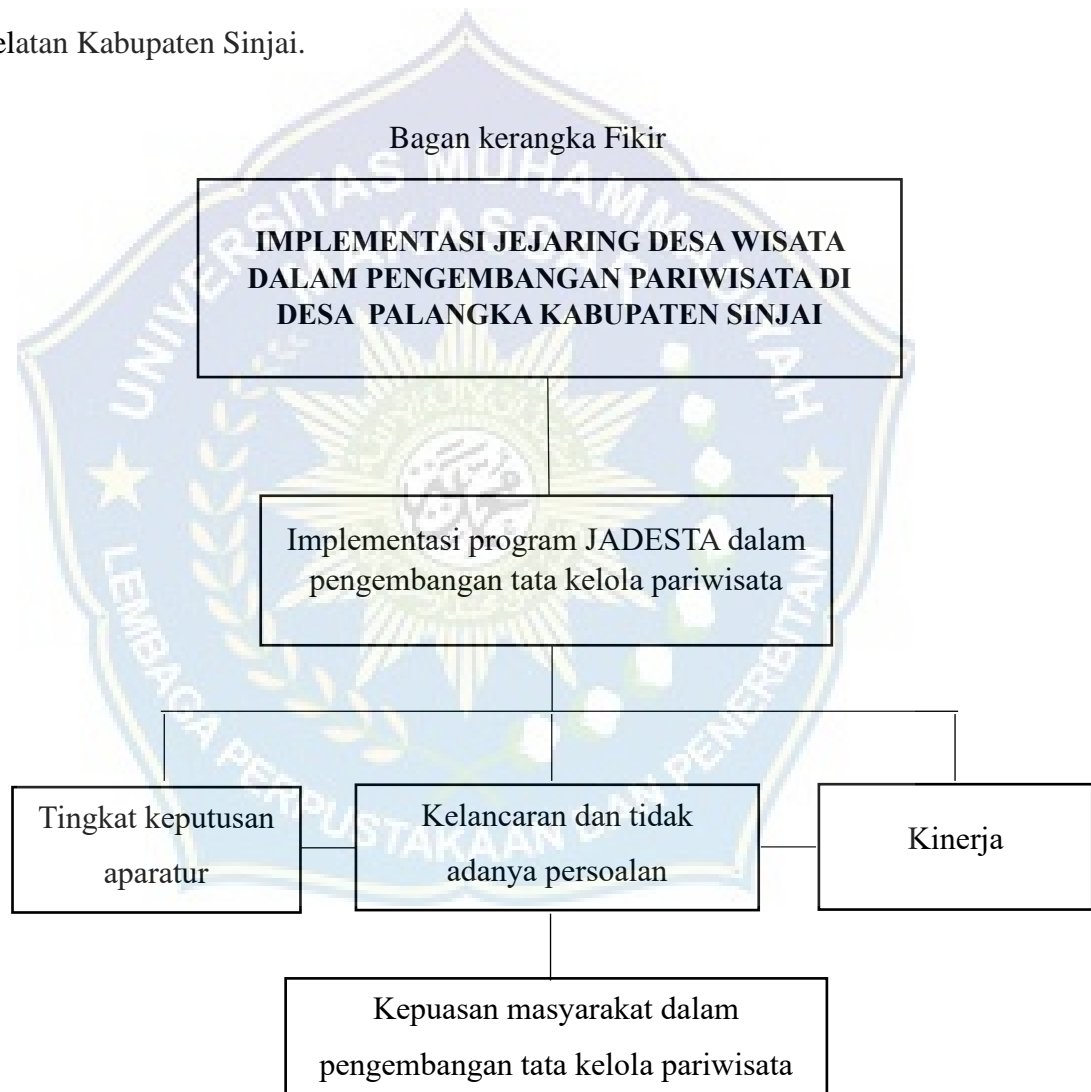
Menurut Nuryanti, Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yan menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Sedangkan menurut Joshi, Desa wisata (*rural tourism*) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan (Dianti 2019).

Dan dari penjelasan tersebut sudah sesuai dengan pernyataan dari Daldjoeni & Suyitno, 2004 yang menyatakan bahwa sektor pariwisata dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan penghasilan masyarakat pedesaan dalam pengembangan perekonomian desa, sehingga pengembangan kawasan pedesaan sebagai kawasan wisata perlu memperhatikan karakteristik sosial budaya, karakteristik geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman (Prakoso 2020).



C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model yang menggambarkan bagaimana hubungan teori yang satu dengan yang lainnya. Yang menjelaskan tentang masalah yang ada, dan kerangka pikir akan menghubungkan antara variabel mana saja yang terkait, serta kerangka pikir ini memberikan sedikit gambaran sebagai tolak ukur Implementasi JADESTA dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.



**Gambar 2.2 Kerangka Pikir
Teori Ripley dan Franklin**

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian ditentukan berdasarkan hasil dari studi pendahuluan, referensi, pengalaman serta saran dari orang yang dipandang ahli. Fokus dalam penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan (Basuki, 2021).

Fokus penelitian berfungsi untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa dan Organisasi Pemuda Desa serta partisipasi Masyarakat dalam mengimplementasikan program JADESTA dalam pengembangan Pariwisata (Studi Kasus Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai).

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus adalah sebuah kata yang sering banyak orang gunakan dalam menyampaikan maksud tertentu. Fokus adalah sebuah kata yang terkadang kita sering lupa akan makna dari kata itu sendiri, karena begitu banyak rencana yang ingin di jalankan atau luput dari perhatian karena kesibukan yang mendera dari waktu-waktu yang semakin menjauhkan dari makna kata fokus itu sendiri.

Fokus pada penelitian ini yaitu:

1. Tingkat keputusan aparatur, Dalam pengimplementasian sebuah program harus di ketahui secara mendalam mengenai program apa saja yang terlaksana dari semua perencanaan.
2. Kelancaran dan tidak adanya persoalan, Menerapkan sebuah program dengan cara mempersiapkan sebuah perencanaan secara matang dan tak lebih mengikuti peraturan dalam pengimplementasian sebuah program.
3. Kinerja. Implementasi dapat diterima dan dan dijalankan apabila terbukti memiliki potensi desa yang dapat di kembangkan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal dan setelah surat izin penelitian telah dikeluarkan. Dan lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Palangka yang terletak di kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga fokus utama metode penelitian ini adalah menjelaskan objek penelitiannya. Sehingga menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang terjadi.

C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari suatu objek yang ada diteliti (*responden*) atau diperoleh informasi dasar di lapangan, instrumen yang peneliti gunakan yaitu wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui membaca atau belajar perpustakaan, buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah tersebut Internet, dokumen kelembagaan dan laporan berkaitan dengan kebutuhan informasi penelitian.

D. Informan

Menurut Moleong (2006;132) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, “Informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dan menurut Arikunto (2006;145), informan adalah orang yang memberikan informasi.

Dengan pengertian ini maka informasi dapat dikatakan sama dengan responden, dan penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan Teknik *purposive sampling* atau penentuan jumlah informan yang dipilih yaitu:

No.	Informan penelitian	Jabatan
1.	Muhammad Ramli., S.Pi	Sekretaris Desa Palangka
2.	Ridwandi., S.Pd	Sekretaris Badan Permusyarawatan Desa Palangka
3.	Nuraaeni., S.Sos	Anggota Badan Permusyarawatan Desa Palangka
4.	Ullang S.Or	Ketua Organisasi Pemuda Desa Palangka
5.	Akbar	Masyarakat Desa Palangka
6.	Nurmiati	Masyarakat Desa Palangka

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dapat diterapkan di lingkungan yang berbeda, dari sumber yang berbeda, dan dengan cara yang berbeda. Untuk itu diperlukan suatu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dengan cepat dan tepat sesuai dengan masalah penelitian dan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa metode yang dapat mempermudah penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan pengamatan yang mencakup catatan tentang keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi langsung yang berkaitan dengan Implementasi program JADESTA dalam pengembangan tata kelola pariwisata di desa palangka kecamatan sinjai Selatan kabupaten sinjai.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan informasi dengan melakukan wawancara langsung (*direct communication*) dengan informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam sebuah wawancara, ada proses interaktif antara pewawancara dan informan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk menyempurnakan teknik observasi dan wawancara, serta meningkatkan keakuratan dan kebenaran data

atau informasi yang dikumpulkan dari bahan dokumenter industri dan dapat digunakan sebagai bahan untuk memverifikasi keakuratan informasi.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif, yaitu mengumpulkan, menyusun dan menjelaskan data yang ada diperoleh secara menyeluruh dari lapangan, baik data yang diperoleh tersebut berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun bahan lainnya secara sistematis.

Peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian menganalisis mengenai kegiatan maupun situasi secara deskriptif dan mendetail. Kemudian diperkuat dengan metode wawancara yang kemudian akan menghasilkan data yang akurat berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari pihak kantor desa dan masyarakat. Dengan begitu, peneliti akan menghasilkan jawaban mengenai penerapan / pengaplikasian program JADESTA dalam pengembangan tata kelola pariwisata berbasis *E-Government* (Studi Kasus Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai).

G. Teknik Pengabsahan Data

Teknik keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan ini benar-benar merupakan suatu penelitian ilmiah untuk menguji data yang diperoleh. Adapun teknik pengabsahan data terdiri dari tiga hal. Di antaranya :

1. Triangulasi Sumber, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.
2. Triangulasi Teknik, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3. Triangulasi Waktu, yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih *valid* (sah) sehingga lebih kredibel (dapat di percaya).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Gambaran penelitian berisi uraian tentang cakupan wilayah atau tempat dilaksanakan penelitian, dan juga dapat memberikan gambaran aktual dari masalah yang diteliti pada lokasi penelitian umum.

1. Gambaran Umum Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan yang dimana Ibu kota kabupaten ini terletak di Sinjai Utara. Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak pada bagian Pantai timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 223 km dari Kota Makassar dan memiliki luas wilayah sekitar 819,96 km² (81.996 ha) serta memiliki penduduk sebanyak 268.496 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2021.

Wilayah Kabupaten Sinjai memiliki ketinggian antara 0 – 2.871 meter diatas permukaan air laut. Dan secara geografis, Kabupaten Sinjai mempunyai batas daerah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bone
- b. Sebelah Timur : Teluk Bone
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Gowa

Memiliki luas wilayah sekitar 819,96 km² , wilayah Kabupaten sinjai sebagian besar masih merupakan daerah kawasan hutan, karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan kawasan-kawasan lainnya.



Gambar 5 Peta Kabupaten Sinjai

Sumber : Sinjai dalam angka 2020 (id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sinjai)

Kabupaten Sinjai terbagi menjadi 9 kecamatan dan 80 desa/kelurahan. Kurun waktu 2020-2024, baik jumlah kecamatan, desa/kelurahan dan dusun/lingkungan tidak ada perubahan. Wilayah pemerintahan Kabupaten Sinjai terbagi atas 9 Kecamatan, 67 Desa dan 13 Kelurahan, serta 354 dusun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Tabel Desa/Kelurahan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Sinjai Barat	9
2	Sinjai Borong	8
3	Sinjai Selatan	11
4	Tellulimpoe	11
5	Sinjai Timur	13
6	Sinjai Tengah	11
7	Sinjai Utara	6
8	Bulupoddo	7
9	Pulau Sembilan	4
	Jumlah	80

Sumber Data : (id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sinjai)

2. Gambaran Umum Desa Palangka

Desa Palangka adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa ini memiliki potensi alam yang cukup besar dan budaya yang khas, serta masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Dan dari segi geografi dan demografi, Desa Palangka memiliki topografi yang bervariasi mulai dari dataran rendah hingga perbukitan. merupakan tulang punggung perekonomian Desa Palangka. Sawah-sawah yang terbentang luas menjadi pemandangan umum di desa ini. Selain padi, masyarakat juga menanam palawija seperti jagung dan kacang-kacangan. Perkebunan yang ada di desa ini juga menghasilkan buah-buahan seperti durian, rambutan, dan mangga yang dikenal memiliki kualitas baik.

a. Letak Administratif Desa Palangka

Desa Palangka terletak di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Utara : Lingkungan Caile Kelurahan Siangaserri
- 2) Sebelah Timur : Dusun Sumpang Ale
- 3) Sebelah Selatan : Dusun Honto
- 4) Sebelah Barat : Dusun Safaere Desa Puncak

Letaknya yang strategis di Kecamatan ini menjadikan Desa Palangka sebagai salah satu desa yang cukup berkembang di Kabupaten Sinjai.

b. Demografi Desa Palangka

Desa Palangka memiliki populasi yang cukup signifikan, dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Berikut adalah beberapa data jumlah penduduk di desa palangka. Diantaranya :

DUSUN	DATA JUMLAH PENDUDUK BULAN APRIL 2024		
	L	P	L+P
SUMPANG ALE	374	387	761
HONTO	315	311	195
BARU	462	445	907
PAO-PAO	457	459	916
KARUMASSING	270	262	532
JUMLAH	1878	1864	3742

Sumber Data : (Kantor Desa Palangka)

c. Visi dan Misi Desa Palangka

1) Visi Desa Palangka

”Mewujudkan Desa Palangka yang Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata”.

2) Misi Desa Palangka

a) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

- Mengembangkan potensi pertanian dan perkebunan dengan teknologi tepat guna.
- Mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) serta kerajinan lokal.
- Meningkatkan akses pasar bagi produk-produk lokal.

b) Peningkatan Kualitas Hidup

- Meningkatkan kualitas Pendidikan melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan.
- Meningkatkan layanan kesehatan dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program kesehatan dan kesejahteraan.

c) Pengembangan Infrastruktur

- Membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
- Mengembangkan sistem irigasi untuk mendukung sektor pertanian.

- Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang baik bagi seluruh warga desa.

d) Pelestarian Kebudayaan dan Tradisi

- Melestarikan dan mempromosikan kebudayaan lokal melalui berbagai kegiatan adat dan festival.
- Mengembangkan potensi pariwisata berbasis budaya dan alam yang berkelanjutan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan serta budaya.

e) Pemerintahan Desa yang Baik

- Menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan profesional.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa.

Dengan visi dan misi tersebut, Desa Palangka berupaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya, sambil tetap menjaga nilai-nilai budaya yang telah menjadi warisan turun-temurun.

B. Hasil Penelitian

1. Kondisi Desa dalam Pengimplementasian Program JADESTA dalam Pengembangan Pariwisata

Program JADESTA dalam pengimplementasiannya merupakan upaya dalam melakukan pembangunan di sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan untuk pemerintah desa yang ada di Kabupaten Sinjai sebagai pelaksana program.

Salah satu desa yang telah menjadi *pilot project* dari program JADESTA yakni Desa Palangka. Desa ini merupakan instansi vertikal yang berada di bawah naungan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DISKOMINFOSANDI) yang diberi mandat oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk mengembangkan potensi pariwisatanya melalui media elektronik. Dan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program JADESTA di desa ini peneliti menggunakan teori implementasi program menurut teori Ripley dan Franklin yang terdiri dari tiga pilar dalam mengoperasikan program, yaitu :

a. Tingkat Keputusan Aparatur

Pelaksana atau implementor kebijakan publik dituntut memiliki sikap dan mentalitas yang mewujud pada tindakan yang patuh dan taat dalam melaksanakan setiap kebijakan. Maka dari itu, para implementor kebijakan diwajibkan untuk mengetahui bahwa apa alasan program JADESTA ini ada, bagaimana pelaksana dapat memahami dan mengkoordinasikan program ini, kegiatan komunikasi antar pihak, khususnya komunikasi kepada pelaksana dan komunikasi kepada kelompok sasaran program (bentuk sosialisasi) agar

seluruh Masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran dari pelaksanaan program ini.

Dalam menjalankan suatu program, hal yang paling mendasar agar suatu program dapat terlaksana dengan baik adalah diperlukannya pemahaman yang mendalam dalam pengimplementasian program tersebut. Hal ini dikarenakan hasil akan tercipta sesuai dengan tingkat pemahaman dalam menjalankan suatu program. Dan yang dimaksudkan disini adalah kegiatan komunikasi dalam bentuk sosialisasi baik bagi para pelaksana program maupun bagi para kelompok sasaran yang ditunjukkan dalam pengimplementasian program tersebut. Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum menjalankan suatu kegiatan komunikasi/sosialisasi yaitu pemberian informasi berupa penetapan jadwal dan metode dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut. Tahapan ini pada dasarnya dimaksudkan agar para pelaksana program maupun kelompok sasaran program dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Terkait dengan hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ridwandi selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan bahwa:

“Dalam pengimplementasian website desa, pemerintah Desa mengoordinasikan ke pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten dan di bantu dengan anak KKN dari salah satu kampus Universitas yang ada di Makassar. Dan untuk bentuk sosialisasi yang diberikan oleh pihak DISKOMINFOSANDI kepada kami selaku Aparatur Desa yang dimana sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi, kami diberikan surat untuk diedarkan ke setiap dusun-dusun untuk diumumkan di masjid-masjid dusun yang ada didesa kita ini. Dan untuk

kegiatan sosialisasinya sendiri dilaksanakan di kantor desa kurang lebih dua tahun lalu”. (Hasil wawancara: 6 mei 2024)“

Setelah mengetahui penetapan jadwal pelaksanaan dan metode dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi/sosialisasi yaitu transmisi perintah dan kejelasan tujuan. Tahapan pemberian sosialisasi pada dasarnya dimaksudkan agar para pelaksana program dapat terhindar dari penyimpangan tugas sekecil apapun. Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Muhamad Ramli selaku Sekretaris Desa menyampaikan bahwa :

“Dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pihak DISKOMINFOSANDI yang dimana Kami diamanahkan untuk menjalankan program dan diberikan pemahaman mengenai tata cara dalam membuat *website* desa yang dikenal dengan istilah JADESTA. Yang dimana dari *website* tersebut kami selaku aparatur desa dapat mengembangkan potensi yang ada di desa khususnya dalam bidang pariwisata. Dan untuk pemilihan aparatur desa sebagai pelaksana program tersebut yang dimana kami lakukan sendiri tanpa menyangkutpautkan pihak DISKOMINFOSANDI”. (Hasil wawancara: 6 mei 2024)

Setelah mengetahui transmisi perintah hal yang penting selanjutnya dalam tahap tingkat Keputusan aparatur adalah kejelasan tujuan dalam pengimplementasian suatu program. Hal ini diperlukan karena dari suatu kejelasan tujuan dapat kita jadikan acuan dalam pengimplementasian suatu program. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Nuraeni selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan bahwa:

“Untuk kejelasan tujuan dari program JADESTA di Kabupaten Sinjai sendiri sudah tercantum dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 32 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan TIK berbasis *website* Desa/Kelurahan dalam hal pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki daya saing serta meluncurkan inovasi agar masyarakat lebih aman, nyaman, dan

mudah dalam mendapatkan pelayanan publik.”. (Hasil wawancara: 6 mei)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Kak Ullang selaku Ketua organisasi Karang Taruna di Desa Palangka, yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya sendiri, tujuan dari program ini sangat bagus. Apalagi yang dikembangkan adalah tempat wisata yang telah kita bangun bersama dulu. Karena kan... ini dapat menambah penghasilan desa. Apalagi dari website ini juga bisa menambah pengunjung terlebih lagi pengunjung dari luar daerah”. (Hasil wawancara 7 mei 2024)

Hal lain yang penting dari pelaksanaan suatu program yakni informasi dan komunikasi. Dikarenakan dengan adanya informasi yang jelas diharapkan setiap pelaksana program dan kelompok sasaran dapat mengetahui dan mengerti apa yang harus mereka lakukan atau yang harus mereka persiapkan agar suatu program dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Nuraeni Anggota Badan Permusyawaratan Desa, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pemberian informasi yang dilakukan oleh Pihak DISKOMINFO terhadap kami selaku aparatur desa yang dimana menurut saya sendiri ada baiknya dan ada juga tidak baiknya. Dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi berupa bimbingan yang mencakup sekabupaten kadang dilaksanakan melalui media online (zoom) dan kadang muncul masalah koneksi. Namun, masalah tersebut dapat teratasi dengan adanya pembuatan grup whatsapp yang dimana dari grup tersebut kami dapat mengatasi permasalahan tersebut”. (Hasil wawancara: 10 mei)

Dan untuk pemberian informasi terhadap kelompok sasaran yang disampaikan oleh Pak Ridwandi selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan bahwa :

“Untuk pemberian informasi yang dilakukan oleh Pihak DISKOMINFO terhadap Masyarakat sendiri yang dimana hanya diawal kegiatan berupa kegiatan sosialisasi. Dan kami selaku aparatur desa juga pernah memberikan informasi terhadap Masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi di Kantor Desa dan yang jadi permasalahan yang dimana kurangnya Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Padahal disitu Kami ingin menyampaikan mengenai tata cara dalam penerapan website tersebut. Oleh karena itu, karena kurangnya Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisai maka kami kadang memberikan informasi kepada Masyarakat ketika kami komunikasi secara pribadi dan membahas hal tersebut”. (Hasil wawancara: 10 mei 2024)

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Nurmiati selaku warga desa Palangka beliau menyampaikan bahwa :

“Itu hari saya ikut hadir dalam kegiatan sosialisasi yang dimana temanya itu kalau tidak salah kegiatan JADESTA dengan tujuan mempromosikan pariwisata yang ada di dusun karumassing kan..??” (Hasil wawancara: 12 mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DISKOMINFOSANDI) Kabupaten Sinjai telah melakukan bimbingan teknis sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi berupa pemberian surat edaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi ke aparatur desa yang nantinya pihak aparatur desa akan mengedarkan surat tersebut ke setiap dusun yang ada di desa palangka. Sedangkan untuk faktor sosialisasinya sendiri dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak DISKOMINFOSANDI kepada para pelaksana program (aparatur desa dan organisasi pemuda desa) dan Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di kantor desa tersebut. Hal ini dikarenakan metode pelaksanaan kegiatan sosialisasinya yang dimana Pihak DISKOMINFOSANDI terjun

secara langsung untuk memberikan pemahaman terkait tata cara dalam pengimplementasian program JADESTA. Dan dari kegiatan dan metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut membuat para aparatur desa menjadi paham dan mendalami mengenai tata cara dalam pengimplementasian program JADESTA khususnya tata cara dalam mengembangkan potensi desa dalam bidang pariwisata melalui media *online* berbasis *website* yang di kenal dengan istilah (Jejaring Desa Wisata).

b. Kelancaran dan tidak adanya persoalan

Para implementor (pelaksana) kebijakan publik di tuntut sedapat mungkin meminimalisir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor selalu diwajibkan menjadi *problem solver* / pemecah masalah dan bukan malah menjadi *problem trigger* atau yang dikenal sebagai pemicu permasalahan. Maka dari itu, dalam mengimplementasikan suatu program sudah jelas diperlukan sebuah organisasi yang terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Poin ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan mengenai siapa saja yang menjadi pelaksana program; penetapan anggaran yang diperlukan; penetapan prasarana dan sarana yang diperlukan; penetapan tata kerja; dan penetapan manajemen pelaksanaan program termasuk pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan program.

1) Pelaksana Program

Aktor pelaksana program dalam pengimplementasian program JADESTA di Kabupaten Sinjai adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian selaku Dinas yang memiliki kewenangan dalam pengimplementasian program JADESTA dan dalam Pelaksanaan program JADESTA ini, pihak / aktor yang terkait sebagai pelaksana yakni sebagian dari perangkat desa di Desa Palangka dan Organisasi Pemuda Desa (Karang Taruna) yang berkoordinasi dengan DISKOMINFOSANDI Kabupaten Sinjai dan terkoneksi atau ter link dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF) Republik Indonesia. Sumber daya manusia (pelaksana) yang terlibat dalam sebuah implementasi program harus disesuaikan dengan program dan aparatur yang memiliki keahlian dalam mensukseskan program tersebut. Dapat diartikan bahwa SDM yang dimiliki harus memiliki kualitas maupun kuantitas dalam mengimplementasikan suatu program dan sumber daya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dari pelaksanaan suatu program. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Ramli selaku Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa :

“Dari program JADESTA kami hanya memilih dua aparatur Desa yang bertugas dalam menjalankan program tersebut. Yaitu Sekretaris BPD dan anggota BPD. Alasan kami memilih dan menugaskan dua aparat desa yang bertugas dalam pengimplementasian program JADESTA dikarenakan kami menugaskan aparatur desa yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Apalagi setiap pihak aparatur desa memiliki wewenang sendiri dan bertanggung jawab atas wewenang yang dijalankan di Kantor Desa kita ini”. (Hasil wawancara 6 mei 2024)

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ridwandi (Sekretaris BPD) yang menyatakan :

“Saya selaku aparatur desa yang ditugaskan untuk melaksanakan program ini biasa di bantu oleh staf desa. Apalagi dalam tahap pengimplementasian program ini, saya selaku aparatur Desa hanya ditugaskan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di pusat dan membuat website desa untuk mempromosikan lokasi pariwisata didesa kita ini. Dan untuk pengembangan lokasi pariwisatanya sendiri kami di bantu oleh para pemuda Karang Taruna dan Masyarakat yang berada disekitaran lokasi pembangunan wisata tersebut”. (Hasil wawancara: 6 mei 2024)

Begitupun yang dinyatakan oleh ketua Karang Taruna Pak ullah yang menyatakan bahwa :

“Kalau menurut saya, yang dimana untuk aktor Pelaksana dari pengembangan pariwisata kita ini sudah cukup. Dikarenakan kita sudah memiliki tempat pariwisata dan sisa untuk mengembangkannya saja”. (Hasil wawancara: 7 mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk pelaksanaan program JADESTA di Desa Palangka sendiri yang dimana pihak / aktor yang terkait sebagai pelaksana hanya ada dua pihak dari aparatur desa. Dikarenakan Sumber daya manusia (pelaksana) yang terlibat dalam sebuah implementasi program harus disesuaikan dengan bidang dan keahliannya dalam mensukseskan program tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa SDM yang dimiliki dalam pelaksanaan suatu program yang dimana harus sesuai dengan kualitas dan keahlian yang dimiliki oleh aparatur desa. Sumber daya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan dari suatu program. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti tidak menemukan kekurangan jumlah SDM pada aparat desa sebagai pelaksana program tersebut. Hal ini dikarenakan mereka ditugaskan sesuai dengan

bidang dan keahliannya dalam mengembangkan program berbasis *website* tersebut khususnya dalam bidang pariwisata. Terlebih lagi dibantu oleh organisasi pemuda desa dan Masyarakat yang ada disekitaran lokasi pengembangan pariwisata tersebut. Sehingga dapat dikatakan semua berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan semua bertanggung jawab atas pekerjaan masing-masing.

2) Sumber Daya Keuangan

Dalam Proses pelaksanaan suatu program diperlukan adanya uang atau finansial yang berguna untuk pembiayaan program tersebut. Suatu program akan terus berlanjut apabila didukung oleh dana yang memadai. Dana dalam sebuah program biasanya digunakan untuk keperluan pembiayaan bagi para pelaksana program, penyediaan fasilitas pendukung untuk implementasi program, untuk keperluan terkait sosialisasi program kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Keterbatasan dana akan mempengaruhi sebuah implementasi program dan kualitas pelayanan yang diberikan. Tanpa adanya dukungan dana, maka sebuah program dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik, efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi program JADESTA tentu saja membutuhkan sumberdaya keuangan dalam berlangsungnya program yang telah dilaksanakan.

Berikut penjelasan terkait dengan sumber daya keuangan dalam pengimplementasian program JADESTA yang dinyatakan oleh Bapak Ridwandi selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan bahwa :

“Untuk Pendanaan dalam menjalankan program biasanya kami ambilkan dari APBDesa. Dan yang menjadi kendala yang dimana biasanya banyak pos-pos anggaran sehingga susah untuk mendapatkan anggaran dari APBDesa”. (Wawancara: 6 mei 2024)

Setelah mengetahui kendala dalam proses pendanaan dalam menjalankan program tersebut, maka yang perlu kita ketahui disini adalah bagaimana Pihak aparaturnya selaku pelaksana program dapat menyelesaikan permasalahan dalam proses pendanaan. Selaku dengan hal tersebut, penyampaian dari Ibu Nuraeni selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa, menyatakan bahwa :

“Dalam pengajuan untuk proses pendanaan ke Pihak APBDesa memang kadang tidak kami dapatkan. Dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kami ambil dana dari bendahara organisasi pemuda desa. (Hasil wawancara: 6 mei 2024)

Setelah mengetahui tindakan penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Pihak Aparatur Desa terkait hal pendanaan dalam pengembangan pariwisata, selanjutnya yang perlu kita ketahui mengenai bagaimana tanggapan dari Organisasi Pemuda Desa terkait dengan hal tersebut. Dan dari hasil wawancara, Pak ulang selaku ketua Karang Taruna menyampaikan bahwa :

“Untuk proses pengembangan pariwisata di desa kita ini, kami tidak memikirkan apakah dana yang digunakan dalam pengembangan pariwisata ini apakah menggunakan dana desa atau dana dari organisasi pemuda desa. Karena intinya pariwisata ini kita bangun dan kita kembangkan Bersama”. (Hasil wawancara: 7 mei)

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam implementasi program JADESTA di Desa Palangka yang dimana untuk sumberdaya keuangan dalam pengimplementasiannya yang dimana semua

tidak berasal dari APBDesa melainkan adanya bantuan dari organisasi pemuda desa (Karang Taruna). Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya istilah “kerja sama” dalam mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh desa tersebut.

3) Sumber Daya Peralatan/Fasilitas

Keberhasilan dari implementasi suatu program juga tergantung pada fasilitas dan peralatan yang ada. Dikarenakan apabila suatu implementasi program tidak didukung dengan fasilitas dan peralatan yang lengkap dan memadai maka program tersebut akan berjalan dengan sia-sia dan akan mempengaruhi berjalannya pelaksanaan program yang akan berdampak pada kinerja suatu program untuk mencapai tujuan yang telah dikehendaki. Berkaitan dengan fasilitas dan peralatan serta sarana dan prasarana dalam rangka pengimplementasian program JADESTA di Desa Palangka, yang disampaikan oleh Pak Ridwandi selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa menyatakan bahwa:

“Alat yang digunakan dalam pengimplementasian program JADESTA hanya komputer dan *wifi* saja. Karena untuk mengakses *website* hanya butuh keduanya saja. Dan untuk penyediaan alat tersebut yang dimana kami diambikan juga dari APBDesa”. (Hasil wawancara: 6 mei 2024)

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam implementasi program JADESTA di Desa Palangka yang dimana untuk sumber daya peralatan/fasilitas dalam pengimplementasiannya yaitu berasal dari APBDesa.

4) Penetapan Manajemen Pelaksana Program

Dalam pengimplementasian program ini, Pemerintah kabupaten harus melakukan pembinaan dan pengawasan dari pelaksanaan kegiatan program JADESTA khususnya dibidang pelayanan publik. Adapun bentuk pembinaan dan pengawasan tersebut berupa bantuan keuangan, sosialisasi bagi masyarakat dan pemerintah desa bahkan orientasi dan pelatihan bagi pelaksana program (staf pelayanan) di tingkat desa. Disisi lain pemerintah desa yang dalam hal ini pemerintah desa Palangka yang menjadi pihak pelaksana dari program JADESTA. Oleh karena itu, dalam melaksanakan program JADESTA membutuhkan koordinasi dalam penetapan manajemen pelaksana. Yang dimana Pihak DISKOMINFOSANDI sebagai koordinator dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Desa sebagai Implementor dari program ini. Berkaitan dengan penentuan manajemen pelaksana diperlukan adanya sebuah koordinasi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ridwandi selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan bahwa :

“Dalam pengimplementasian program ini, pihak pemerintah desa sebagai pelaksana program JADESTA memerlukan koordinasi dengan Pihak DISKOMINFOSANDI terkait dengan pelaksanaan program. Dan dari koordinasi tersebut, Kami selaku pihak pelaksana diberikan arahan dalam bentuk rapat koordinasi dan *monitoring* (pemantauan) dalam rangka menunjang program JADESTA. Dan untuk rapat koordinasinya sendiri kadang dilaksanakan secara internal maupun eksternal”. (Hasil wawancara: 6 mei 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintah desa Palangka selaku pihak pelaksana dari program JADESTA juga melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal dengan

DISKOMINFOSANDI terkait dengan pelaksanaan program tersebut. Koordinasi tersebut dilakukan pada saat kegiatan pelaksanaan pelayanan publik berlangsung di desa ini. Bentuk koordinasi bahwa desa telah diberikan pelatihan sampai pada proses untuk desa mengentry data profil desanya kedalam sistem dan juga pelatihan penggunaan sistem JADESTA. Dan dalam pelaksanaannya juga diperlukan adanya *monitoring* yang dilaksanakan oleh pihak DISKOMINFOSANDI untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan program ini berjalan.

5) Penetapan Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan juga sangat penting untuk melihat bagaimana kesiapan dan proses berlangsungnya suatu program. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ridwandi selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa, sebagai berikut:

“Untuk kesiapan yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan program ini yaitu menyediakan alat yang diperlukan dalam menjalankan program. Seperti *computer* dan *wifi*. Selanjutnya kami memengentry/memasukan data ke *website* JADESTA yang telah dibuat oleh Pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan untuk memasukkan data ke *website*, kami masukan langsung tanpa perlu melalui perantara apakah harus ada persetujuan dari Pihak DISKOMINFOSANDI atau Pihak KEMENPAREKRAF. (Hasil wawancara: 6 mei 2024)

Setelah mengetahui kesiapan yang dilakukan oleh Pihak Aparatur Desa terkait hal penetapan jadwal kegiatan, selanjutnya yang perlu kita ketahui mengenai bagaimana proses berlangsungnya program tersebut. Dan dari hasil wawancara, Ibu Nuraeni selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan bahwa :

“Dan untuk proses berlangsungnya program itu sendiri yang dimana Kami selaku aparaturnya desa sudah tidak memasukan data terbaru lagi terhadap website tersebut. Hal ini dikarenakan lokasi pariwisata tersebut sudah tidak berjalan lagi seperti dulu”. (Hasil wawancara: 6 mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat kita ketahui bahwa untuk pembagian jadwal kegiatan bagi desa dimulai dari penyediaan alat yang diperlukan dalam menjalankan program dan memasukan data ke *website* JADESTA yang telah dibuat oleh Pihak Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan untuk memasukan data ke dalam *website* dilakukan secara langsung tanpa perlu adanya persetujuan dari Pihak DISKOMINFOSANDI atau Pihak KEMENPAREKRAF. Dan untuk proses keberlangsungan / pengembangan lokasi pariwisata itu sendiri sudah tidak terealisasi.

c. Kinerja

Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektifnya proses implementasi kebijakan publik dan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektifitas dan optimalisasi kinerja kebijakan juga ditentukan oleh kinerja individu para implementor kebijakan publik itu sendiri. Dan untuk mengetahui kinerja para implementor kebijakan apakah telah menjalankan tugas secara efektif dan optimal maka yang perlu kita bahas disini mengenai sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan bagaimana hasil dari pengeluaran kebijakan yang telah dilakukan.

1) Sikap Para Pelaksana dalam Menjalankan Program

Sikap para pelaksana dapat dilihat dari dukungan yang diberikan oleh pelaksana baik berupa komitmen, tingkah laku, dan karakter yang dianut

dalam menjalankan program. Dan dalam mengimplementasikan program, pelaksana program dituntut untuk menerapkan setiap aturan atau persyaratan sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam pengimplementasian suatu program diperlukan juga keseriusan agar program dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Bapak Ridwandi selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan bahwa :

“Sesuai dengan SOP yang berlaku, Sebagaimana mestinya pelayanan pada saat kekantor desa, ini hanya cara pemerintah Desa untuk menjangkau semua lapisan Masyarakat. Dan untuk menjangkau semua lapisan Masyarakat Kami hanya ditugaskan oleh Pihak DISKOMIFOSANDI untuk membuat website Desa untuk mengembangkan potensi Desa dalam bidang pariwisata”. (Hasil wawancara: 6 mei 2024)

Dari pendapat diatas, maka yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah tindakan dari aparat desa terkait keberlanjutan dari pelaksanaan program JADESTA dalam pengembangan pariwisata tersebut. Dan dari hasil wawancara, Bapak Ridwandi (Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa) menyatakan bahwa :

“Untuk keberlanjutan program tersebut yang dimana sudah tidak berjalan secara optimal lagi. Dan untuk alasannya sendiri dikarenakan pengunjung yang datang semakin lama malah semakin kurang sehingga membuat ketidakseimbangan antara pembangunan dan pemasukan desa atau dalam artian dananya tidak ada”. (Hasil wawancara: 10 mei 2024)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pak ullah selaku ketua Organisasi Karang Taruna yang menyampaikan bahwa :

“Saya selaku ketua dari Organisasi Pemuda Desa tidak lagi mengembangkan potensi pariwisata tersebut dikarenakan organisasi Karang Taruna Kita ini sudah tidak aktif lagi atau dalam artian kurangnya partisipasi dari para pihak organisasi dengan alasan sudah banyak keluar daerah”. (Hasil wawancara: 7 mei 2024)

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat sebagai pengguna program JADESTA di Desa Palangka terkait sikap dan hasil kinerja dari Pelaksana Program. Dan hasil wawancara dengan Ibu Nurmiati selaku Warga Desa Palangka yang menyatakan bahwa :

“Menurut saya sih... Sikap dan tindakan hasil kinerja dari para pelaksana program sekarang kurang baik. Dikarenakan tempat pariwisatanya sudah tidak sama seperti dulu lagi. Padahal dulu saya sering kesana membawa keluarga saya yang datang ke rumah sembari membuat hiburan dan untuk melihat potensi Desa yang dimiliki di Desa Kita ini”. (Hasil wawancara; 12 mei)

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan, dapat dipahami bahwa para pelaksana program JADESTA di Kantor Desa Palangka belum mengimplementasikan program sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku. khususnya dalam hal pengembangan untuk keberlanjutan suatu program. Hal ini terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara hasil dari pembangunan lokasi pariwisata dan pendapatan dari pariwisata tersebut. Selain itu, kurangnya partisipasi baik dari Pihak Aparatur Desa maupun dari Organisasi Pemuda Desa untuk mengembangkan kembali potensi pariwisata yang dimiliki oleh Desa tersebut.

2) *Policy Output*

Implementasi program merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para pelaksana program kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan

kebijakan diharapkan muncul ketika hasil dari pengimplementasian program dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka waktu tertentu hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Dan untuk mengetahui hasil dari pengimplementasian suatu program maka terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan. Diantaranya :

a) Akses

Akses pelayanan dalam program JADESTA menerapkan pelayanan berbasis fiber optik yang telah terintegrasi atau dengan kata lain program ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan. Terkait hal tersebut, terdapat penyampaian dari Pak Muhammad Ramli selaku Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa :

“Dalam pengaksesannya sendiri sangat mudah, dikarenakan dalam pengaksesan berupa data pariwisata yang dimiliki oleh Desa yang dimana Masyarakat hanya perlu membuka website untuk melihat apa saja potensi yang ada dalam lokasi pariwisata yang ada di Desa Kita ini. Dan untuk komunikasi yang ingin dilakukan oleh pengunjung terhadap kami selaku aparat desa cukup melalui media online tanpa perlu datang langsung ke Kantor Desa. Dikarenakan

didalam website tersebut sudah tertera contact person dari aparaturnya selaku pihak pelaksana program”. (Hasil wawancara: 6 mei 2024)

Terkait hal tersebut, Bapak Ridwandi selaku sekretaris Badan Permasyarakatan Desa menyatakan bahwa :

“Untuk Potensi yang ingin diketahui oleh Masyarakat semuanya memang sudah ada Kami masukan ke website tersebut. Baik itu berupa profil, fasilitas, lokasi pariwisata, dan lain sebagainya. Namun untuk bagian kontak personnya sendiri yang dimana sudah tidak aktif lagi sehingga Masyarakat yang ingin melakukan komunikasi melalui media online kepada Kami selaku aparaturnya Desa sudah tidak bisa dilakukan lagi. Hal ini terjadi dikarenakan sudah banyak risefel (perubahan) kepengurusan yang terjadi di Pemerintah Desa. Jadi yang menjadi admin kontak person yang tercantum biasanya kepala desa yang lama”. (Hasil wawancara: 6 mei 2024)

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat sebagai pengguna program JADESTA di Desa Palangka terkait akses yang diberikan oleh aparaturnya selaku Pelaksana program. Dan hasil wawancara dengan Ibu Nurmiati selaku warga desa palangka yang menyatakan bahwa:

“Untuk potensi yang ada di lokasi pariwisata memang sudah dimasukkan semua. Namun yang jadi permasalahan hanya dibagian kontak personnya. Yang dimana semua kontak person yang tertera di website tersebut, sekarang sudah tidak ada yang aktif lagi baik itu komunikasi yang ingin dilakukan melalui media telepon, email, facebook, dan bahkan Instagram semuanya sudah tidak ada yang aktif lagi. (Hasil wawancara: 12 mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa untuk akses pelayanan publik berupa pengimplementasian potensi yang ada dalam lokasi pariwisata tersebut semuanya sudah dimasukkan/tercantum ke dalam *website* yang telah diimplementasikan oleh aparaturnya desa. Dan sistem atau situs berbasis jaringan internet ini dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat sehingga dapat

mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan dalam *website* tersebut memberikan pelayanan *online* dan menggunakan sistem berbasis data yang *valid* sehingga membuat Masyarakat tidak perlu mencari informasi secara manual terkait potensi pariwisata yang ada di Desa Palangka. Dan dari kondisi tersebut menjelaskan bahwa program JADESTA di Desa Palangka telah memberikan dampak positif seperti kemudahan akses dalam pelayanan publik sehingga data lokasi pariwisata dapat langsung diketahui Masyarakat dengan cara cukup mengakses *website* yang didalamnya sudah memperlihatkan data yang *valid* tanpa perlu mencari data secara manual terkait potensi pariwisata yang ada di Desa Palangka. Namun, walaupun potensi pariwisata yang ada di desa palangka sudah diimplementasikan secara keseluruhan kedalam *website*, ternyata masih terdapat sebuah permasalahan yang dimana dari hasil wawancara, Masyarakat menjelaskan bahwa dalam *website* tersebut permasalahannya terdapat dalam bagian kontak *person* yang didalamnya sudah tidak ada yang aktif lagi sehingga membuat Masyarakat yang ingin melakukan komunikasi terhadap aparatur desa tidak dapat dilakukan secara *online*. Dan dari hasil terhadap para aparatur desa yang menyatakan bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan sudah banyak risefel (perubahan) kepengurusan yang terjadi di Pemerintah Desa. Dan yang menjadi admin kontak *person* yang tercantum adalah kepala desa yang masa jabatannya telah habis dan sudah tergantikan.

b) Cakupan

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan) oleh kebijakan publik yang telah diimplementasikan. Dan untuk mengetahui cakupan dalam pengimplementasian suatu program maka yang perlu kita bahas disini adalah dari hasil dari pengimplementasian program yang dilakukan oleh Aparatur Desa terhadap Masyarakat untuk meneruskan kembali potensi yang dimiliki oleh Desa khususnya dalam bidang pariwisata. Terkait dengan hal tersebut sesuai dengan penyampaian dari Bapak Muhammad Ramli selaku Sekretaris desa yang menyatakan bahwa:

“Dalam pengimplementasian program JADESTA, sepenuhnya belum mencakup kebutuhan Masyarakat secara keseluruhan. Tapi setidaknya sudah bisa mempermudah dalam melakukan pelayanan publik khususnya dalam bidang pariwisata”. (Hasil wawancara: 6 mei 2024)

Sesuai dengan hal tersebut, Bapak Ridwandi selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa menyatakan bahwa :

“Walaupun program ini sudah tidak berjalan seperti diawal kegiatan (pengimplementasian program JADESTA) setidaknya kami telah berusaha untuk mengembangkan program ini. Karena untuk cakupannya sendiri semua tergantung dari Masyarakat itu sendiri mengenai mau datang atau tidaknya tergantung dari keinginan mereka sendiri. Karena sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pariwisata ini tidak kami kembangkan lagi dikarenakan terkendala masalah dana. (Hasil wawancara: 6 mei 2024)

Terkait dengan kendala masalah dana dan kurangnya pengunjung yang datang, Pihak Aparatur Desa pernah Bekerja sama dengan Pihak organisasi pemuda desa untuk mengembangkan lagi potensi pariwisata yang dimiliki oleh Desa dengan cara mengubah pembayaran masuk agar

dapat menambah pengunjung. Terkait dengan hal tersebut sesuai hasil wawancara dari Bapak Ullang selaku Ketua Organisasi Karang Taruna yang menyatakan bahwa :

“Terkait dengan masalah dana dalam menjangkau sasaran, sebenarnya kami telah berinisiatif untuk mengubah metode pembayaran agar menarik pengunjung. Yang dimana yang dulunya biaya masuk sebesar 15.000 per orang kami merubah metode pembayaran yang dimana untuk biaya masuknya bebas (tergantung dari keinginan pengunjung pariwisata itu sendiri). Dan dari perubahan metode pembayaran tersebut, pengunjung pariwisata pernah bertambah. Namun yang jadi permasalahan yang dimana kadang ada pengunjung yang sama sekali tidak melakukan pembayaran. Al-hasil dana yang di dapat tetap tidak bertambah dan justru malah berkurang”. (Hasil wawancara: 10 mei 2024)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh masyarakat desa yang diwakili oleh Bapak Akbar selaku Warga Dusun Karumassing Desa Palangka yang menyatakan bahwa :

“Walaupun program ini sudah tidak berjalan seperti dulu lagi, tapi setidaknya Saya selaku penduduk yang tinggal berdekatan dengan lokasi pariwisata ini kadang melihat pengunjung yang datang. Dan untuk pengunjung yang datang kadang ada yang tidak melakukan pembayaran”. (Hasil wawancara: 8 mei 2024)

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa dalam pengimplementasian program JADESTA yang ada didesa Palangka sudah bisa mempermudah dalam melakukan pelayanan publik khususnya dalam bidang pariwisata. Dan walaupun pelayanan dapat dilakukan dengan mudah, namun aparaturnya desa dan organisasi pemuda desa tetap melakukan usaha dalam meneruskan berjalannya program tersebut dengan alasan pendapatan dari hasil pariwisata sudah tidak berjalan secara optimal seperti diawal pengimplementasian program

tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan kelompok sasaran yang dijangkau tidak bertambah dan justru malah berkurang sehingga membuat lokasi pariwisata tersebut tidak dapat dikembangkan. Dan dari berbagai usaha telah dilakukan untuk mengembangkan kembali potensi pariwisata yang dimiliki oleh Desa namun tetap saja hasil dari usaha tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan dengan alasan kurangnya pengunjung yang datang sehingga membuat pendapatan berkurang.

c) Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Indikator yang satu ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Maka dari itu yang perlu kita bahas disini terkait kesesuaian program dengan kebutuhan aparatur desa dan kesesuaian program dengan kebutuhan Masyarakat.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ramli selaku Sekretaris Desa Palangka yang menyatakan bahwa:

“Saya selaku Pihak dari aparatur desa menyatakan bahwa program ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada didesa kita ini. Dikarenakan dengan adanya program ini dapat mempermudah dalam pemberian pelayanan terhadap Masyarakat yang dilakukan melalui media online (berbasis *website*). Dan melalui *website* tersebut desa kita dan bahkan desa-desa yang lain dapat dengan mudah menampilkan semua potensi yang ada di desanya”. (Hasil wawancara: 6 mei 2024)

Pendapat yang sama juga disampaikan Bapak Ridwandi selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan desa yang menyatakan bahwa :

“Program ini sudah sesuai dengan kebutuhan aparaturnya Desa dalam mengembangkan potensi yang ada di Desa Kita ini. Terlebih lagi sebelum adanya program JADESTA yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pihak DISKOMINFOSANDI ini, Kita telah memiliki lokasi pariwisata yang belum diketahui sepenuhnya oleh Masyarakat luar daerah. Dan setelah adanya program ini, membuat pengunjung yang datang bertambah. Cuman, untuk keberlangsungannya sendiri yang dimana sudah tidak seperti dulu lagi. Hal ini dikarenakan Pihak Pemerintah Kabupaten dan DISKOMINFOSANDI hanya memberikan bantuan berupa sosialisasi untuk pembuatan *website* dan setelah itu sudah tidak ada lagi”. (Hasil wawancara: 6 Mei 2024)

Dari pendapat di atas, maka yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah kesesuaian program dengan kebutuhan Masyarakat. Dan dari hasil wawancara Bapak Ridwandi selaku Sekretaris BPD menyatakan bahwa :

“Untuk program ini sudah memenuhi kebutuhan Masyarakat dalam pemberian informasi terkait potensi yang ada di Desa khususnya dalam bidang pariwisata. Apalagi kita sekarang sudah berada dalam era modernisasi yang dimana hampir semua Masyarakat memiliki HP dan dapat dapat mengetahui potensi pariwisata yang ada di Desa kita ini dengan cukup membuka *website* saja”.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat sebagai pengguna program JADESTA di Desa Palangka terkait kesesuaian program dengan kebutuhan. Dan dari hasil wawancara dengan Ibu Nurmiati selaku Warga Desa Palangka yang menyatakan bahwa :

“Menurut saya program ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Dikarenakan dari program ini, masyarakat termasuk masyarakat dari luar daerah dapat mengetahui apa saja potensi pariwisata yang ada di Desa Kita ini. Dan untuk pemenuhan kebutuhannya sendiri saya rasa belum terpenuhi dikarenakan sampai sekarang pariwisata yang ada di Desa kita sudah tidak berjalan seperti dulu lagi”. (Hasil wawancara: 12 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui DISKOMINFOSANDI telah

membuat sebuah program yang sesuai dengan keadaan di lapangan dan selanjutnya program tersebut direalisasikan di masing-masing desa yang ada di Sinjai tak terkecuali yang ada di desa Palangka. Desa ini telah melaksanakan program JADESTA yang telah sesuai dengan kondisi dilapangan dan mencoba mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Desa. Sedangkan untuk proses keberlanjutannya sendiri yang dimana sudah tidak lagi berjalan dengan efektif dan optimal.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan para narasumber yang telah dilaksanakan, maka diambil deskripsi umum tentang temuan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi program JADESTA yang ada di Desa Palangka, meliputi tentang implementasi program dan juga kendala serta potensi yang dimiliki dalam mengimplementasikan program.

Dari hasil temuan tersebut, kemudian peneliti berupaya untuk melakukan analisis hasil dari penelitian yang berkaitan dengan implementasi JADESTA yang ada di Desa Palangka. Analisis ini dilakukan dengan melihat hasil temuan di lapangan sebagaimana yang telah dideskripsikan dan membandingkannya dengan teori yang digunakan dalam penelitian dalam implementasi program JADESTA di desa palangka. Kemudian peneliti akan memfokuskan pembahasan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan proses implementasi kebijakan program dari Ripley dan Franklin dengan tujuan untuk mengetahui proses implementasi program

JADESTA di Desa Palangka. Proses tersebut dilihat dari tiga tahap kegiatan dalam implementasi sebuah program, yaitu pertama tingkat keputusan aparatur, tahap kelancaran dan tidak adanya persoalan dan tahap kinerja. Adapun hasil analisis dari tiga tahapan ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Keputusan Aparatur

Para pelaksana atau implementor kebijakan publik khususnya dalam mengimplementasikan program JADESTA dituntut memiliki sikap dan mentalitas yang mewujud pada tindakan yang patuh dan taat dalam melaksanakan setiap kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah. Dan Untuk kejelasan tujuan dari program JADESTA di Kabupaten Sinjai sendiri sudah tercantum dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 32 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) berbasis *website* Desa / Kelurahan dalam hal pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki daya saing serta meluncurkan inovasi agar masyarakat lebih aman, nyaman, dan mudah dalam mendapatkan pelayanan publik.”.

Dalam menjalankan suatu program, hal yang paling mendasar agar suatu program dapat terlaksana dengan baik adalah diperlukannya sebuah pemahaman yang mendalam agar hasil yang tercipta nantinya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sinjai melakukan koordinasi dengan Pihak DISKOMINFOSANDI agar memberikan informasi dalam bentuk sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan melalui pertemuan awal antara DISKOMINFOSANDI Kabupaten Sinjai dengan para *stake holder* (pemangku

kepentingan) yang menjadi pelaksana program di lapangan yakni kantor-kantor desa yang ada di Kabupaten Sinjai khususnya di Desa Palangka. Pemberian sosialisasi merupakan bentuk pertemuan awal yang dilakukan oleh pihak DISKOMINFOSANDI, lalu selanjutnya dengan pemberian bimbingan teknis kepada para pelaksana program di lapangan khususnya kepada para pelaksana yang menjadi petugas registrasi / operator *online* di Kantor Desa. Yang dimana, Para petugas/aparatur desa diberikan bimbingan teknis dalam menginput data kedalam *website* yang telah dibuat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (KEMENPAREKRAF RI) dan menggunakan situs berbasis *website* yang terhubung / terkoneksi dengan seluruh DISKOMINFOSANDI yang ada di Indonesia.

Hal lain yang dilakukan yakni adanya pertemuan-pertemuan koordinasi yang dilakukan secara *daring* antara Pihak DISKOMINFOSANDI Kabupaten Sinjai dengan para pelaksana program/aparatur desa yang dilaksanakan melalui media *online* (zoom). Dan dalam rangka proses implementasi program JADESTA dapat diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan oleh KEMENKOMINFOSANDI Kabupaten Sinjai dengan kantor-kantor desa yang ada dapat dikatakan sudah dijalankan dengan baik. namun sosialisasi yang dijalankan kepada masyarakat dapat dikatakan masih dianggap kurang atau belum intens dikarenakan pemberian informasi hanya dilakukan pada awal kegiatan sosialisasi. Dan Pihak yang sering memberikan komunikasi terkait informasi program ini lebih sering dilakukan oleh perangkat desa sebagai perwakilan dari pelaksana program.

2. Kelancaran dan Tidak Adanya Persoalan

Para implementor (pelaksana) kebijakan publik diuntut sedapat mungkin meminimalisir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor selalu diwajibkan menjadi *problem solver* (pemecah masalah) dan bukan malah menjadi *problem trigger* atau yang di kenal sebagai pemicu permasalahan dalam menjalankan suatu program yang diimplementasikan. Namun, hal ini cenderung tidak bisa berjalan dengan baik ketika sosialisasi sudah berjalan efektif tetapi tidak didukung dengan pengorganisasian yang baik dan memadai. Setelah dijabarkan kedalam kebijakan teknis operasional maka dilakukanlah proses kegiatan pengaturan yang terdapat pada tahap kelancaran dan tidak adanya persoalan. Dan agar pengimplementasian dalam suatu program dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan tahap pengorganisasian Sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Jones dalam (Widodo, 2009:90) yang menyatakan bahwa tahap pengorganisasian lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya ; penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, darimana sumbernya, penetapan prasarana dan sarana apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan. Dikeranankan dalam tahap ini pengaturan dan penetapan berupa komponen.

a. Pelaksana Program

Aktor pelaksana program dalam pengimplementasian program JADESTA di Kabupaten Sinjai adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian selaku Dinas yang memiliki kewenangan dalam pengimplementasian program JADESTA dan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah desa selaku instansi vertikal untuk melaksanakan program dimasing-masing desa yang ada di Kabupaten Sinjai khususnya desa Palangka.

Untuk para aktor / aparatur desa yang ditugaskan sebagai pengurus inti dalam mengimplementasikan program JADESTA yang terpilih hanya ada dua dari Pihak Aparatur Desa. Yaitu (Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa). Hal ini dikarenakan Sumber daya manusia (pelaksana) yang terlibat dalam sebuah implementasi program harus disesuaikan dengan program dan aparatur yang memiliki keahlian dalam mensukseskan program tersebut. Terlebih lagi setiap pihak aparatur desa memiliki wewenang sendiri dan bertanggung jawab atas wewenang yang dijalankan di Kantor Desa. Selain itu, untuk pelaksanaan tugas dalam pengimplementasian program JADESTA itu sendiri tidak dianggap susah dikarenakan Pihak Aparatur Desa hanya ditugaskan untuk mengikuti setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak DISKOMINFOSANDI mengenai tata cara dalam memasukkan / mempromosikan data pariwisata kedalam Website yang telah dibuat oleh (KEMENPAREKRAF RI). Dan untuk pengembangan

lokasi pariwisatanya sendiri Pihak aparaturnya desa dibantu oleh Organisasi Pemuda Desa yang ada di Desa tersebut. Sehingga dapat dikatakan semua berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan semua bertanggung jawab atas pekerjaan masing-masing.

b. Sumber Daya Keuangan

Dalam Proses pelaksanaan program JADESTA, hal yang juga diperlukan dalam mengimplementasikan suatu program adalah diperlukan adanya uang atau finansial yang berguna untuk pembiayaan program tersebut. Dikarenakan suatu program akan terealisasi dan terus berlanjut apabila didukung oleh dana yang memadai. Dana dalam sebuah program biasanya digunakan untuk keperluan pembiayaan bagi para pelaksana program, penyediaan fasilitas pendukung untuk implementasi program, untuk keperluan terkait sosialisasi program kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Tanpa adanya sumber daya keuangan maka akan membuat para pelaksana program sangat sulit untuk melaksanakan program tersebut. Sumberdaya keuangan berkaitan dengan kegiatan menggerakkan organisasi, meskipun dalam kegiatan organisasi juga mencakup sumberdaya manusia dan peralatan/sarana prasarana. Biaya diperlukan sebagai operasionalisasi pelaksanaan suatu program atau kegiatan, karena efektifitas berjalannya program atau kegiatan sangat ditentukan oleh sumberdaya keuangan.

Terkait proses pendanaan dalam menjalankan program tersebut yang dimana anggarannya sendiri didapat dari APBDesa. Namun yang jadi kendala yang dimana dari semua pengajuan dana yang dilakukan oleh Pihak Aparatur

pelaksana program kadang tidak terealisasi dikarenakan banyaknya pos-pos anggaran yang ada di Desa. Dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pihak Aparatur Desa kadang mengambil dana dari Organisasi Pemuda Desa dikarenakan dalam proses pengembangan pariwisata yang dimiliki oleh desa palangka, Organisasi Pemuda Desa juga ikut berpartisipasi sebagai pihak pelaksana dalam pengimplementasian program tersebut.

c. Sumber Daya Peralatan/Fasilitas

Pelaksanaan program JADESTA di Desa Palangka, sarana dan prasarana tersebut adalah semua peralatan yang digunakan dalam mendukung penerapan program tersebut dengan memanfaatkan semua kemajuan teknologi informasi dan komunikasi agar dalam pelaksanaannya tercapai sesuai tujuan yang diharapkan oleh penyelenggara pelayanan publik. Keberhasilan dari implementasi suatu program juga tergantung pada fasilitas dan peralatan yang ada. Dikarenakan apabila suatu implementasi program tidak didukung dengan fasilitas dan peralatan yang lengkap dan memadai maka program tersebut akan berjalan dengan sia-sia dan akan mempengaruhi berjalannya pelaksanaan program yang akan berdampak pada kinerja suatu program untuk mencapai tujuan yang telah dikehendaki. Dan untuk peralatan yang digunakan dalam mengimplementasikan program JADESTA hanya berupa komputer dan *wifi*. Hal ini dikarenakan Pihak Aparatur Desa hanya ditugaskan memasukan data potensi pariwisata ke dalam *website* JADESTA (Jejaring Desa Wisata). Dan dari penyediaan peralatannya sendiri juga berasal dari dana APBDesa.

d. Penetapan Manajemen Pelaksana Program

Menurut Widodo (2009:93) Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang digunakan. Bila salah satu diantara pelaku kebijakan ditunjuk untuk menjadi koordinator, biasanya lembaga yang terkait erat dengan pelaksana kebijakan yang diberi tugas sebagai leading sector (sektor unggulan) yang bertindak sebagai koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam melaksanakan program JADESTA membutuhkan koordinasi dalam penetapan manajemen pelaksana. Yang dimana Pihak DISKOMINFOSANDI sebagai koordinator dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Desa sebagai Implementor dari program. Dan Bentuk koordinasinya sendiri yang dimana setiap desa telah diberikan pelatihan sampai pada proses untuk desa mengentry data profil desanya kedalam sistem dan juga pelatihan penggunaan sistem JADESTA. Selain itu, koordinasi juga dilakukan ketika pemerintah desa mengalami kendala saat pelaksanaan program JADESTA khususnya di bidang pariwisata. Serta koordinasi juga dilakukan melalui rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DISKOMINFOSANDI dengan memberikan arahan dalam bentuk monitoring (pemantauan) dalam rangka menunjang program JADESTA yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal dengan tujuan untuk melihat atau mengecek progress

seluruh desa yang ada di kabupaten Sinjai termasuk desa Palangka sebagai desa pillot project.

e. Penetapan Jadwal Kegiatan

Tahap pengorganisasian tak terlepas dari poin penetapan jadwal kegiatan yang harus ditetapkan oleh pelaksana. Widodo (2009:93) menjelaskan jadwal pelaksanaan kegiatan sangat penting, karena dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, jadwal kegiatan ini perlu ditegaskan dan disusun serta harus dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku kebijakan.

Dalam Jadwal pelaksanaan kegiatan juga sangat penting untuk melihat bagaimana kesiapan dan proses berlangsungnya suatu program yang dijalankan oleh setiap Desa. Dan untuk penerusan berjalannya program tersebut, Pihak dari Pemerintah pusat mengadakan lomba JADESTA dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini dilakukan agar setiap desa memiliki daya saing untuk mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki dalam Desa tersebut. Dan maksud dari Jangka waktu yang dimaksudkan disini adalah dalam setiap satu tahun sekali data yang terdapat dalam *website* perlu diperbaharui dalam bentuk memasukan data terbaru sesuai dengan standar atau kriteria lomba JADESTA yang diadakan tiap tahunnya. Namun dari hasil penelitian, Desa Palangka sendiri terakhir memasukan data ke *website* dua tahun lalu (2022) dan sudah tidak memasukan data terbaru lagi terkait pengembangan potensi pariwisata yang ada di Desa Palangka.

3. Kinerja

Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektifnya proses implementasi kebijakan publik dan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektifitas dan optimalisasi kinerja kebijakan juga ditentukan oleh kinerja individu para implementor kebijakan publik itu sendiri. Dan untuk mengetahui kinerja para implementor kebijakan pelaksana program JADESTA di Desa Palangka apakah telah menjalankan tugas secara efektif dan optimal maka yang perlu kita bahas disini mengenai sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan bagaimana hasil dari pengeluaran kebijakan yang telah dilakukan.

a. Sikap Para Pelaksana dalam Menjalankan Program

Implementasi program JADESTA tidak terlepas dalam sikap para pelaksana dalam menjalankan suatu program, sikap pelaksana dilihat sebagai dukungan / komitmen, tingkah laku / kebiasaan, dan karakter yang mereka jalankan dalam mengimplementasikan program. Kecenderungan sikap pelaksana dapat memberikan dampak dalam pelaksanaan program. Karakteristik pelaksana program juga tercermin dari setiap sikap berupa tindakan yang ditunjukkan. Dan dalam mengimplementasikan suatu program, pelaksana program dituntut untuk menerapkan setiap aturan atau persyaratan sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam pengimplementasian suatu program juga diperlukan keseriusan agar program dapat berjalan dengan baik.

Dan dari hasil penelitian yang dimana sikap dan tindakan yang dimiliki oleh para pelaksana program JADESTA yang ada di Desa Palangka dapat dikatakan kurang optimal / tidak sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* yang berlaku. Dikarenakan Pihak Aparatur Desa selaku pelaksana program sudah tidak lagi menjalankan/mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Desa. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara hasil dari pembangunan lokasi pariwisata dan hasil pendapatan dari pariwisata. Selain itu, kurangnya partisipasi baik dari Pihak Aparatur Desa maupun dari Organisasi Pemuda Desa untuk mengembangkan kembali potensi pariwisata yang dimiliki oleh Desa.

b. *Policy Output*

Implementasi program merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para pelaksana program kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan muncul ketika hasil dari pengimplementasian program dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka waktu tertentu hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Selain itu, hasil dari pengimplementasian program dapat dikatakan sebagai hal lain yang juga berpengaruh dalam kinerja. Dan untuk mengetahui hasil dari pengimplementasian suatu program maka terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan. Diantaranya :

1) Akses

Kesesuaian Program dengan indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa sebuah program pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh pengguna layanan. Dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui DISKOMINFOSANDI sebagai salah satu dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pemerintahan desa telah membuat sebuah inovasi pelayanan publik dengan berbasis internet dan teknologi informasi komunikasi untuk masyarakat desa, pemerintah berusaha untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Sinjai dengan mengimplementasikan program JADESTA yang dirasa mampu untuk menjangkau masyarakat desa. Selanjutnya program ini direalisasikan oleh masing-masing pemerintah desa yang ada di Kabupaten Sinjai tak terkecuali Desa Palangka. Dan dengan adanya program ini masyarakat bisa dengan mudah melihat data pariwisata yang ada di desa hanya dengan mengakses *website* tanpa perlu mencari data secara manual. Dan untuk mengaksesnya sendiri, Masyarakat hanya perlu mengakses portal (*jadesta.kememparekraf.go.id*) yang dimana dalam *website* tersebut terdapat data pariwisata yang mencakup seluruh desa yang ada di Indonesia tak terkecuali desa Palangka.

Dan untuk kinerja dalam pemberian akses pelayanan yang dilakukan oleh Pihak Pelaksana program JADESTA yang ada di desa Palangka sendiri dapat dikatakan kurang efisien. Hal ini dikarenakan data *valid* (sah) yang dimasukan ke dalam *website* pariwisata hanya berupa profil, fasilitas,

lokasi pariwisata, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bagian kontak personnya sendiri sudah tidak aktif lagi dikarenakan banyaknya risefel (perubahan) kepengurusan yang terjadi di Pemerintah Desa. Dan yang menjadi admin kontak person yang tercantum dalam *website* adalah kepala desa yang masa jabatannya telah habis dan sudah tergantikan. Padahal dapat dikatakan bahwa komunikasi terkait pemberian informasi atau penyampaian pengaduan terhadap pelaksana program yang ada di desa merupakan bagian penting terlebih lagi jikalau dilaksanakan secara *online* sehingga dapat membuat Masyarakat melakukan komunikasi tanpa perlu datang langsung ke Kantor Desa.

2) Cakupan

Cakupan mengarah pada seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan) oleh program yang telah diimplementasikan. Dalam hal ini indikator cakupan juga dapat dipergunakan untuk melihat sejauh mana program JADESTA yang dilaksanakan di Desa Palangka dapat menjangkau sasaran. Dalam pengimplementasian program JADESTA di Desa Palangka, sepenuhnya belum mencakup kebutuhan Masyarakat secara keseluruhan, terutama pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa terhadap Masyarakat. Dikarenakan pengimplementasian program yang telah dijalankan sudah tidak berlanjut terutama dalam pembangunan pariwisata Hal ini dibuktikan dari data yang telah dimasukkan ke *website* yang dimana Pihak aparatur desa Fterakhir memasukan data dua tahun lalu (2022) dan sudah tidak

memasukkan data terbaru lagi terkait pengembangan potensi pariwisata yang ada di Desa Palangka. Hal ini terjadi dikarenakan dalam mengembangkan potensi pariwisata diperlukan adanya bantuan berupa anggaran dana. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Pihak aparaturnya desa dan organisasi pemuda desa telah berusaha untuk mengembangkan kembali potensi pariwisata yang dimiliki oleh Desa dengan cara mengubah metode pembayaran masuk (tergantung dari keinginan pengunjung). Namun dari usaha tersebut tetap saja tidak berjalan sesuai dengan harapan dengan alasan kurangnya pengunjung yang datang sehingga membuat pendapatan berkurang.

3) Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Indikator yang digunakan ini berguna untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pihak pemerintah Desa Palangka sebagai instansi yang berada dibawah kewenangan DISKOMINFOSANDI sudah merealisasikan program JADESTA yang dibuat sesuai dengan keadaan atau kebutuhan di lapangan dan banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya program ini khususnya terbantu di bidang pariwisata.

Hal seperti ini dapat diketahui dari hasil wawancara dan observasi yang sebelumnya telah dilakukan di Desa Palangka yang membuktikan bahwa adanya program ini memberikan kemudahan bagi aparaturnya desa dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Desa. Terlebih lagi

sebelum adanya program JADESTA yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pihak DISKOMINFOSANDI, di Desa Palangka sendiri telah memiliki pariwisata yang belum diketahui sepenuhnya oleh masyarakat luar daerah. Sehingga setelah adanya program ini, membuat pengunjung yang datang bertambah. Tapi untuk keberlangsungannya sendiri yang dimana sudah tidak berjalan efisien.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam *Implementasi* program JADESTA dapat dikatakan memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat lokal secara inklusif dan berkelanjutan. Dan berdasarkan indikator *implementasi* menurut Ripley dan Franklin

1. Tingkat Keputusan Aparatur

Pemerintah Palangka mengambil inisiatif melalui Peraturan Bupati Sinjai Nomor 32 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi lingkup PemKab Sinjai Berbasis *website* Desa/Kelurahan melalui JADESTA. Landasan hukum ini dijadikan pedoman dari implementasi program JADESTA di bidang pariwisata. Tidak hanya menjabarkan sebuah kebijakan umum menjadi kebijakan teknis operasional atau petunjuk pelaksanaan, implementasi program JADESTA bidang pariwisata di desa Palangka juga mengkomunikasikan dengan pihak terkait melalui sosialisasi.

Kesesuaian antara pelaksana dengan intruksi kerja yang diberikan serta ketepatan sasaran dalam program JADESTA sudah berjalan baik. Para pelaksana sudah bekerja sesuai dengan intruksi kerja yang tercantum dalam pedoman program JADESTA maupun arahan-arahan yang telah diberikan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ketepatan sasaran telah disesuaikan dengan tujuan dari adanya program JADESTA khususnya dalam bidang pariwisata adalah untuk

membuka ruang untuk berkarya, menciptakan lapangan kerja serta mempersiapkan desa wisata lebih mendunia melalui pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mensinergikan program kerja DISKOMINFOSANDI di lingkup pemerintahan desa sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu khususnya dalam bidang pariwisata

2. Kelancaran dan Tidak Adanya Persoalan

Aktivitas pengorganisasian yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Palangka dalam hal ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan struktur organisasi, sumber daya manusia atau pelaksana, sumber daya anggaran atau keuangan yang dalam hal ini berupa Peraturan Bupati Sinjai Nomor 32 Tahun 2018. Dalam program JADESTA aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program yakni Bupati Sinjai, Dinas Komunikasi dan Persandian Sinjai, dan Pemerintah Desa. Dalam hal SDM pada yang pemerintah desa palangka yang ditugaskan sebagai pengurus inti secara kualitas dapat dikatakan baik karena dari semua jumlah pegawai yang ditugaskan sebagai pengurus inti dalam pengimplementasian program tersebut semuanya lulusan s1 dan mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan komputer sedangkan dari segi kuantitas terdapat kekurangan jumlah pegawai khususnya pada staff pelayanan online dan tak jarang terjadi rangkap jabatan sementara. Dalam hal anggaran dapat dikatakan terorganisir kurang baik mulai dari awal program ini ada dengan dibiayai ADD dalam APBDesa. Nantinya dari anggaran ini

dipakai untuk membiayai sarana dan prasarana pelaksanaan program seperti komputer dan wifi. Sedangkan penetapan manajemen pelaksana berkaitan dengan pola kepemimpinan dan koordinasi, pola kepemimpinannya dari program JADESTA seutuhnya dipegang oleh Bupati Sinjai dengan menjalankan pengawasan terhadap program sedangkan koordinasinya dilakukan oleh DISKOMINFOSANDI yang dijadikan sebagai koordinataor dengan pemerintah desa.

3. Kinerja

Kinerja merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan. pada poin ini berkaitan dengan sikap pelaksana dan *policy output*. Dalam menjalankan program sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana program dapat dikatakan kurang optimal / tidak sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* yang berlaku. Dikarenakan kurangnya partisipasi baik dari Pihak Aparatur Desa maupun dari Organisasi Pemuda Desa untuk mengembangkan kembali potensi pariwisata yang dimiliki oleh Desa. Sedangkan untuk *policy output* didalamnya menjelaskan akses yang digunakan dalam pelaksanaan program JADESTA dalam pengembangan tata kelola pariwisata berbasis website dengan memanfaatkan teknologi dan informasi melalui sistem yang terintegrasi dan memiliki fungsi yang sama. Cakupan dari pelaksanaan program JADESTA yakni masyarakat desa dengan kebutuhan pelayanan publik untuk melihat data pariwisata yang ada. Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat yang dimana kebutuhan masyarakat akan

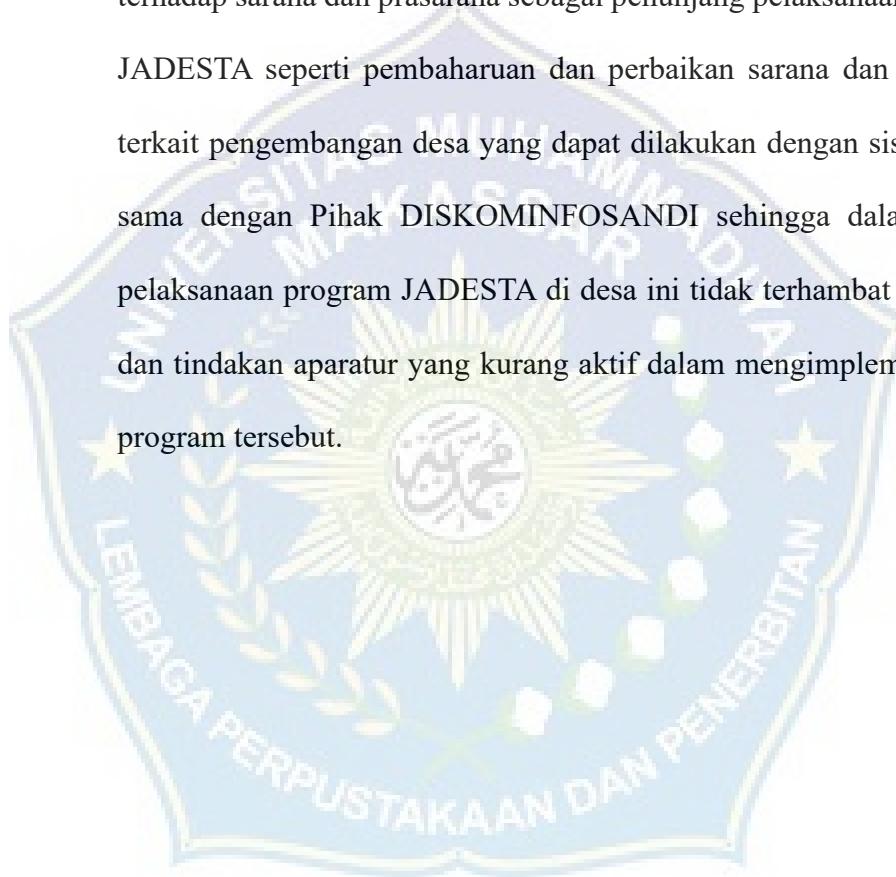
pelayanan publik semakin menurun dengan banyaknya keluhan permasalahan kesenjangan pelayanan publik yang ada di desa Palangka meliputi pariwisata yang sudah tidak lagi dikembangkan.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai program JADESTA yang dilakukan oleh pemerintah desa Palangka maupun oleh Dinas Informasi dan Komunikasi dan Persandian Kabupaten Sinjai yang bersifat merata dan berkelanjutan karena masih ada beberapa masyarakat Desa Palangka yang belum mengetahui tujuan seutuhnya dari program JADESTA. Metode untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa palangka bisa melalui pertemuan atau acara tiap RT-RW dan dusun atau melalui papan informasi yang terpasang di tiap RT ataupun sosialisasi langsung yang dilaksanakan di balai desa, sedangkan bagi pemerintah kabupaten sinjai yang diwakilkan oleh DISKOMINFOSANDI untuk semua kalangan masyarakat melalui tayangan videotron yang dipasang di titik pusat keramaian yang ada di pusat kota dengan konten yang berisi tentang inovasi Potensi pariwisata ataupun bisa melakukan kerjasama dengan dinas lain untuk mempromosikan / memperlihatkan setiap potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Desa Palangka diharapkan dapat memberikan perhatian berupa penambahan pegawai *personil operator* / staff pelayanan bagi pelaksanaan program JADESTA, mengingat dalam pelaksanaannya

memberikan banyak akses situs portal pelayanan publik yang disediakan untuk masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya jika operator pelayanan ditambah maka nantinya satu operator bisa fokus menangani ke salah satu akses dan tidak terbagi-bagi dengan pekerjaan lainnya.

3. Bagi pemerintah desa Palangka perlu memberikan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan program JADESTA seperti pembaharuan dan perbaikan sarana dan prasarana terkait pengembangan desa yang dapat dilakukan dengan sistem kerja sama dengan Pihak DISKOMINFOSANDI sehingga dalam proses pelaksanaan program JADESTA di desa ini tidak terhambat oleh dana dan tindakan aparaturnya yang kurang aktif dalam mengimplementasikan program tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrika, J., and A. Frinaldi. 2023. "Implementasi E-Goverment Di Kabupaten Sijunjung: Studi Kasus Aplikasi Si Sutan Mudo." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan*
- Anggraeni, Irviani. 2019. "Pengertian Implementasi Dan PendapaT Ahli." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):16–36.
- Anon. 2019. "No Title 对职业教育的影响." (6):1–22.
- Aprilia, S. N., B. Kusbandrijo, and A. I. Rochim. 2022. "IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA APLIKASI PDS-PAJAK DAERAH SIDOARJO:(Studi Kasus Di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)." *PRAJA Observer: Jurnal*
- Auliyaa, Putri, Rahmat Hidayat, and Rudyk Nababan. 2022. "Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Melalui Ogan Lopian." *Kinerja* 18(4):502–12. doi: 10.30872/jkin.v18i4.9804.
- Awaludin, Ludi. 2019. "Strategi Penguatan Kompetensi Sdm Teknologi Informasi&Komunikasi (Tik) Dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)." *Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 2(2):118–34. doi: 10.23969/paradigmapolistaat.v2i2.2115.
- Dianti, Yira. 2017. "濟無No Title No Title No Title." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5–24.
- EFENDI, A. 2020. *IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI VIEW PROBOLINGGO (Studi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Probolinggo)*. repository.upm.ac.id.

- Imaddudin, Haidar. 1967. "Konsep Desa Wisata Dalam Perencanaan." *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. 1(69):5–24.
- Imania, Annisaa Nurlaila, and Tiyas Nur Haryani. 2021. "E – Government Di Kota Surakarta Dilihat Dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik." *Wacana Publik* 1(1):176. doi: 10.20961/wp.v1i1.53143.
- Kalsum, U., and S. Listyarini. 2022. "IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PELAYANAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA" *Jurnal Darma Agung*.
- Maulita, Nanda. 2022. "Abdi Dosen." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6(2):352–56.
- Prakoso, Aditha Agung. 2020. *Konsep Dan Teori Desa Wisata*.
- Putri, Amelia, Dadan Kurniansyah, and Evi Priyanti. 2021. "Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Website Opensid Open-Side Website-Based Public Service Innovation." *Jurnal Manajemen* No.13(Vol.4):1–9. doi: 10.29264/jmmn.v13i4.9885.
- Quayson, M., C. Bai, and V. Osei. 2020. "Digital Inclusion for Resilient Post-COVID-19 Supply Chains: Smallholder Farmer Perspectives." *IEEE Engineering Management*
- Rafinzar, R., and Kismartini Kismartini. 2020. "Inovasi E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Faktor Pendukung Dan Penghambat Program e-Musrenbang Di Kota Surabaya)." *Jurnal Administrasi Publik* 6(2):227–50.
- Rofifah, Dianah. 2020. "Implementasi Media Pembelajaran Permainan Ular Tangga Iqro." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 12–26.

Savina, S. V, O. N. Tsvetkova, L. I. Galimova, and ... 2020. "Application of Telecommunications Technologies in the Management of Territories." *Journal of ...*

Tasyah, Amelia, Puji Ayu Lestari, Anada Syofira, Cintania Ade Rahmayani, Rizka Dwi Cahyani, and Novita Tresiana. 2021. "Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) Di Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 18(2):212–24.

Yuni, Irma Sari, and M. Fachri Adnan. 2022. "Efektivitas Penerapan Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile Dalam Upaya Mendukung Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6(1):1982–94. doi: 10.58258/jisip.v6i1.2648.

Yutristiani, G. S. 2022. *Penerapan E-Goverment Pada Pelayanan Publik Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP)(Studi Kasus DISDUKCAPIL Kabupaten Trenggalek)/Ggsela repository.um.ac.id.*

L

A

M

P

I

R

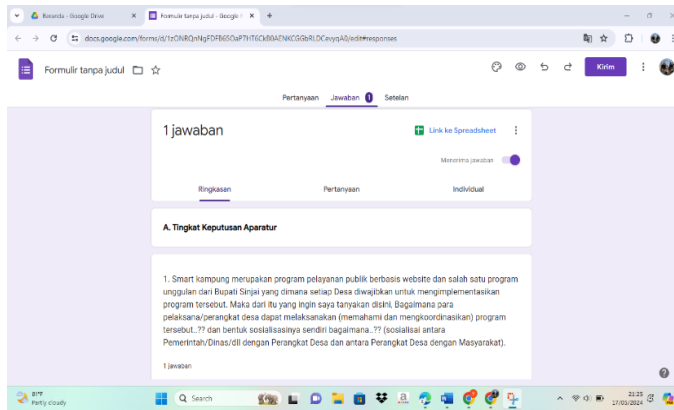
A

N





Wawancara dengan Bapak Muhammad Ramli S.Pi
selaku Sekretaris Desa Palangka



Wawancara dengan Bapak Ridwandi, S. Pd selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Palangka



Wawancara dengan Ibu Nuraeni S. Sos
selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Palangka



Wawancara dengan Bapak Ullang S.Or
selaku Ketua Organisasi Pemuda Desa Palangka



Wawancara dengan Bapak Akbar
selaku Masyarakat Desa Palangka



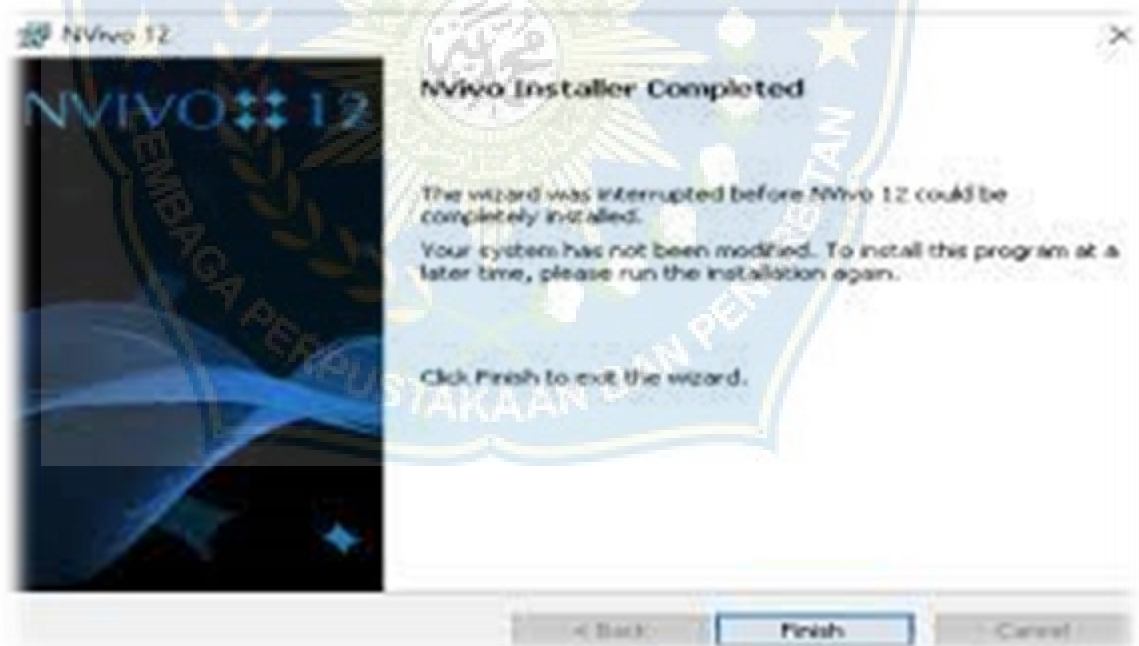
Wawancara dengan Ibu Nurmiati
selaku Masyarakat Desa Palangka



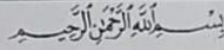
Publish or Perish

VOSviewer Online

Visualizing scientific landscapes



Aplikasi Olah Data



PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

Nomor : 2835/FSP/A.5-VI/XII/1445/2023

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Ian Rezi Pratama
Stambuk : 105641108120
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

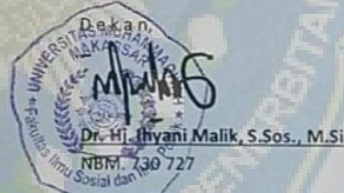
Dengan Rencana Judul Skripsi :

**"Implementasi Program *Smart Kampung* Dalam Pelayanan Publik
Berkbasis *Website* di Kabupaten Sinjai"**

Pembimbing I : Dr. Amir Muhiddin, M.Si
Pembimbing II : Hamrun, S.IP., M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,
Pada tanggal : 12 Desember 2023



Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip





1 2 0 2 4 1 9 0 0 9 0 0 0 9 3

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Birngere Kabupaten Sinjai Telpun : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Yth. Kepala Desa Palangka Kec. Sinjai Selatan
Kab. Sinjai

Nomor : 00316/16/04/DPM-PTSP/IV/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 7340/S.01/PTSP/2024, Tanggal 26 Maret 2024 Perihal Penelitian.

Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : IAN REZKI PRATAMA
Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai/08 Juli 2002
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NIM : 105641108120
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Sumpang Ale, Kel./Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, Dengan Judul : **IMPLEMENTASI PROGRAM SMART KAMPUNG DALAM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS WEBSITE DI KABUPATEN SINJAI**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 26 Maret s/d 26 April 2024
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
 2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
 3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
 4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
 5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 03 April 2024

a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,



Dilandatangani secara elektronik oleh

LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc

NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar
3. Camat Sinjai Selatan Kab. Sinjai
4. Yang Bersangkutan (Ian Rezki Pratama)
5. Arsip



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ian Rezki Pratama

Nim : 105641108120

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Mei 2024

Mengetahui,

Ket. Dala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurshah, S.Hum, M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

RIWAYAT HIDUP



Ian Rezki Pratama lahir di Sinjai pada tanggal 08 Juli 2002, merupakan anak pertama dari dua bersaudara buah hati dari Ayah Mustafa dan Ibu Rania. Penulis menempuh Pendidikan pertama di SD 44 Palangka dan selesai pada tahun 2014, penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 2 SINJAI dan selesai pada tahun 2017, pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan di SMAN 2 SINJAI dan selesai pada tahun 2020. Berkat dukungan dari orang tua disertai dengan doa, pada tahun 2020 penulis berhasil lulus masuk Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1). Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT bisa menempuh ilmu yang merupakan bekal dimasa depan. Saat ini penulis berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan baik dan membahagiakan orang tua. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Implementasi Jejaring Desa Wisata (JADESTA) dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Palangka Kabupaten Sinjai”